

PROFIL DESA PEDULI GAMBUT

DESA PULAU LIMBUNG
KECAMATAN SUNGAI RAYA
KABUPATEN KUBU RAYA
PROVINSI KALIMATAN BARAT



**PROFIL DESA
PULAU LIMBUNG
KECAMATAN SUNGAI RAYA
KABUPATEN KUBU RAYA
PROVINSI KALIMATAN BARAT**



**PROGRAM DESA PEDULI GAMBUT
BADAN RESTORASI GAMBUT
DEPUTI BIDANG EDUKASI, SOSIALISASI,
PARTISIPASI DAN KEMITRAAN**

LEMBAR PENGESAHAN

**DESA PULAU LIMBUNG
KECAMATAN SUNGAI RAYA,
KABUPATEN KUBU RAYA,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2018**

PENYUSUN:

1. sebagai Fasilitator Desa BRG RI
2. sebagai Enumerator Pemetaan Sosial BRG RI
3. sebagai Enumerator Pemetaan Sosial BRG RI
4. selaku Tim Asistensi Sosial
5. selaku Tim Asistensi Spasial

LEMBAR PERSETUJUAN DESA :

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, selaku Lurah dan Sekretaris Desa Pulau Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan barat, menyatakan menyetujui laporan hasil pemetaan sosial yang dilakukan oleh Tim Penyusun di atas Badan Restorasi Gambut (BRG) Republik Indonesia menyatakan bahwa hasil ini telah disampaikan kepada perwakilan masyarakat Bahaur Basantan.

Pulau Limbung , Mei 2018

Sekretaris Desa

Kepala Desa

.....

.....

KATA PENGANTAR

Laporan profil desa peduli gambut ini merupakan hasil dari kegiatan pemetaan sosial yang telah dilaksanakan pada bulan April-Mei 2018 dan bekerjasama dengan para pihak, mulai dari tingkat provinsi, kecamatan, dan desa. Melalui proses ini, telah disampaikan informasi tentang konsep restorasi ekosistem, kegiatan yang direncanakan dan telah dilaksanakan, rencana kelola serta proses pemetaan desa yang telah mengadaptasi umpan balik dari para pihak akan rencana yang disepakati dan persetujuan legal.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Badan Restorasi Gambut (BRG) yang sudah mempercayakan kami sebagai tim pemetaan sosial. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Desa Limbung yang mendukung kami dalam menyelesaikan pekerjaan sebagai tim pemetaan sosial. Semoga hasil yang kami peroleh dapat menjadi penunjang dalam segala aktivitas dalam mengembangkan potensi lahan gambut dan sumber daya manusia di Desa Pulau Limbung.

Kubu Raya, Mei 2018

Tim Pemetaan Sosial Pulang Pisau

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Metodologi dan Pengumpulan Data	3
1.4. Struktur Laporan.....	3
 BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI	
2.1. Lokasi Desa.....	7
2.2. Orbitasi	7
2.3. Batas dan Luas Wilayah.....	8
2.4. Fasilitas Umum dan Sosial.....	8
 BAB III LINGKUNGAN FISIK DAN EKOSISTEM GAMBUT	
3.1. Topografi.....	11
3.2. Geomorfologi dan Jenis Tanah.....	11
3.3. Iklim dan Cuaca	12
3.4. Keanekaragaman Hayati.....	17
3.5. Hidrologi di Lahan Gambut	18
3.6. Kerentanan Ekosistem Gambut	19
 BAB IV KEPENDUDUKAN	
4.1. Data Umum Penduduk.....	21
4.2. Laju Pertumbuhan Penduduk	22
4.3. Tingkat Kepadatan Penduduk	22
 BAB V PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	
5.1. Jumlah Tenaga Pendidikan dan Tenaga Kesehatan.....	23
5.2. Kondisi Fasilitas Pendidikan dan Fasilitas Kesehatan.....	24
5.3. Angka Partisipasi Pendidikan	26
5.4. Jumlah Korban Bencana Kebakaran dan Asap Tahun 2015	26
 BAB VI KESEJARAHAN DAN KEBUDAYAAN MASYARAKAT	
6.1. Sejarah Desa	29
6.2. Etnis, Bahasa, dan Agama	30
6.3. Kesenian Tradisional	31
6.4. Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam	31

BAB VII PEMERINTAHAN DAN KEPEMIMPINAN

7.1.	Pembentukan Pemerintahan	33
7.2.	Struktur Pemerintahan Desa.....	33
7.3.	Kepemimpinan Tradisional.....	35
7.4.	Aktor Berpengaruh.....	36
7.5.	Mekanisme Penyelesaian Sengketa/Konflik Penguasaan Lahan	36
7.6.	Mekanisme/Forum Pengambilan Keputusan Desa	37

BAB VIII KELEMBAGAAN SOSIAL

8.1.	Organisasi Sosial Formal	39
8.2.	Organisasi Sosial Nonformal	41
8.3.	Jejaring Sosial Desa	41

BAB IX PEREKONOMIAN DESA

9.1.	Pendapatan dan Belanja Desa.....	43
9.2.	Aset Desa	44
9.3.	Tingkat Pendapatan Warga.....	44
9.4.	Industri dan Pengolahan di Desa	46
9.5.	Potensi dan Masalah dalam Pengelolaan Lahan Gambut	46

BAB X PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DAN SUMBER DAYA ALAM

10.1.	Pemanfaatan Tanah dan Sumber Daya Alam	49
10.2.	Penguasaan Tanah dan Sumber Daya Alam	50
10.3.	Penguasaan Lahan Gambut atau Parit/Handil	51
10.4.	Peralihan Hak Atas Tanah (termasuk Lahan Gambut)	52
10.5.	Sengketa Tanah di Lahan Gambut dan Non-Gambut	52

BAB XI PROYEK PEMBANGUNAN DESA.

11.1.	Program Pembangunan Desa	53
11.2.	Program Kerjasama dengan Pihak Lain	57

BAB XII PERSEPSI TERHADAP RESTORASI GAMBUT

Persepsi Terhadap Restorasi Gambut	59
--	----

BAB XIII PENUTUP

13.1.	Kesimpulan	61
13.2.	Saran	61

DAFTAR PUSTAKA.....	63
---------------------	----

LAMPIRAN	65
----------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan di Kecamatan Sungai Raya Tahun 2016.....	12
Tabel 2.	Kecepatan Angin dan Temperatur Udara di Kecamatan Sungai Raya Tahun 2016	13
Tabel 3.	Kalender Musim	15
Tabel 4.	Jenis Keanekaragaman Hayati dan Vegetasi	17
Tabel 5.	<i>Jumlah Penduduk Desa Pulau Limbung Berdasarkan Jenis Kelamin</i>	<i>21</i>
Tabel 6.	<i>Jumlah Penduduk Desa Pulau Limbung Berdasarkan Jenis Kelamin</i>	<i>22</i>
Tabel 7.	Ketersediaan Tenaga Pendidik Desa Pulau Limbung	23
Tabel 8.	Jumlah Tenaga Kesehatan Desa Pulau limbung	24
Tabel 9.	Sarana Pendidikan dan Kesehatan Desa Pulau Limbung	25
Tabel 10.	Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar (SD) Desa Pulau Limbung	26
Tabel 11.	Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama (SMP) Desa Pulau Limbung	26
Tabel 12.	Jumlah Penyebaran Etnis Warga yang Bermukim di Desa Pulau Limbung	31
Tabel 13.	Hubungan Kelembagaan dan Aktor yang ada di Desa	39
Tabel 14.	Ringkasan APBDesa Pulau Limbung	43
Tabel 15.	Mata Pencarian	45
Tabel 16.	Pemanfaatan Tanah dan sumberdaya	50
Tabel 17.	Bentuk Penggunaan Lahan di Desa Pulau Limbung.....	51
Tabel 18.	Penggunaan Dana Desa pada porgram pembangunan dan pemberdayaan	55
Tabel 19.	Penggunaan ADD Desa Pulau Limbung	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Batas dan Luas Wilayah Desa Pulau Limbung	8
Gambar 2.	Grafik Jenis Tanah Desa Pulau Limbung	11
Gambar 3.	Grafik Pertumbuhan Penduduk Desa Pulau Limbung	22
Gambar 4.	Struktur Pemerintahan Desa Pulau Limbung	34
Gambar 5.	Pemfaatan Tanah dan Sumber Daya	49
Gambar 6.	Grafik Pola Pemanfaatan dan Penguasaan Ruang	50
Gambar 7.	Penguasaan Tanah dan sumberdaya	51



Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Gambut, sepotong kata yang boleh jadi tidak dimengerti maknanya oleh kebanyakan orang tetapi menjadi banyak arti bagi yang lainnya. Gambut memang dapat diartikan menjadi banyak pengertian tergantung dari sudut mana orang memandangnya. Seorang petani, mengartikan lahan gambut sebagai prasarana untuk budidaya. Pengusaha dapat melihatnya sebagai sumber komoditas hasil hutan (kayu maupun non kayu), media tanam yang dapat diekspor, sumber energi, atau lahan pengembangan bagi komoditas perkebunan yang lebih luas.

Peneliti menganggapnya sebagai obyek penelitian, sosiolog mengartikannya sebagai lingkungan sosial dimana komunitas hidup dan mencari penghidupan, pemerintah memandangnya sebagai potensi sumberdaya alam yang dapat dikelola untuk lebih banyak lagi mencukupi pangan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Sementara pakar lingkungan menobatkannya sebagai pengatur air/hidrologi, sarana konservasi keanekaragaman hayati, serta penyerap dan penyimpan karbon yang mampu meredam perubahan iklim global.

Hutan gambut merupakan ekosistem penting yang dapat memberikan sumbangan signifikan terhadap kestabilan iklim global. Karena keunikannya ekosistem gambut dianggap sebagai lahan marginal dan kurang memberikan manfaat secara finansial, walaupun sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Lahan gambut dapat mengatur keseimbangan pelepasan air meskipun dalam kondisi kemarau panjang, sehingga keseimbangan ekologi masih dapat terus terjaga.

Hutan atau lahan Gambut memiliki fungsi dan manfaat hidrologi, sosial-ekonomi, keanekaragaman hayati, dan penyimpan karbon. Keberadaan lahan gambut saat ini mulai terancam oleh berbagai aktivitas seperti konversi lahan, ekstraksi berlebih, pengeringan/*drainase*, hingga kebakaran mengancam kelestarian hutan dan lingkungan hidup. Langkah perlindungan dan pemanfaatan lahan gambut jangka panjang yang perlu diupayakan adalah dengan mempertahankan gambut sebagai kawasan yang terlindungi, sehingga fungsi alaminya bisa tetap lestari.

Kebakaran gambut tahun 2015 ditengarai sebagai akibat akumulasi kesalahan kebijakan maupun teknis pengelolaan ekosistem gambut. Komitmen pemerintah untuk menempatkan program restorasi dan rehabilitasi ekosistem gambut sebagai prioritas dalam pengelolaan gambut di masa depan merupakan hal yang sangat penting. Namun demikian, untuk memulihkan ekosistem gambut yang rusak, diperlukan sistem dan teknik yang sesuai. Sistem tersebut juga harus memperhatikan aspek ekologi, produksi dan sosial ekonomi.

Sejalan dengan semangat perlindungan dan pemulihan ekosistem gambut dan pelaksanaan tugas pokok Badan Restorasi Gambut (BRG), maka rencana program dan kegiatan restorasi gambut perlu penghimpunan partisipasi, dan dukungan masyarakat luas khususnya di tingkat desa dan/atau antar desa. Salah satu bentuk peningkatan dan penguatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan restorasi ekosistem gambut di tingkat desa dan antar desa melalui pelaksanaan program Desa Peduli Gambut (DPG).

Desa Peduli Gambut adalah kerangka penyelarar untuk program-program pembangunan yang ada di perdesaan gambut, khususnya di dalam dan sekitar areal restorasi gambut. Pendekatan yang digunakan adalah merajut kerjasama antar desa yang ada dalam satu bentang alam Kesatuan Hidrologis Gambut. Pembentukan kawasan perdesaan gambut menjadi pintu masuk bagi perencanaan pengelolaan gambut oleh desa-desa tersebut. Program Desa Peduli Gambut meliputi kegiatan fasilitasi pembentukan kawasan perdesaan, perencanaan tata ruang desa dan kawasan perdesaan, identifikasi dan resolusi konflik, pengakuan dan legalisasi hak dan akses, kelembagaan untuk pengelolaan hidrologi dan lahan, kerja sama antar desa, pemberdayaan ekonomi, penguatan pengetahuan lokal dan kesiapsiagaan masyarakat desa dalam menghadapi bencana kebakaran gambut. Sebagai dukungan teknis terhadap program BRG, kemudian dibentuk Fasilitator/Pendampingan Desa Peduli Gambut, Koordinator Pemetaan Sosial, Enumerator Pemetaan Sosial dan Tenaga Penghubung. Di tahun 2017 Program BRG menysasar 75 desa yang tersebar di 7 Provinsi seluruh Indonesia. Koordinator Pemetaan Sosial, Fasilitator Desa dan Enumerator bekerja bersama untuk memfasilitasi penyusunan perencanaan desa yang memperhatikan aspek restorasi gambut.

1.2 Maksud dan Tujuan

Tujuan profil desa ini adalah untuk memahami keadaan sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan Desa Pulau Limbung. Pendataan terhadap segala macam potensi yang ada di desa seperti keanekaragaman hayati, plasma nutfah, flora, fauna dan vegetasi di ekosistem gambut. Berikut juga dengan Profil desa sebagai gambaran keadaan gambut agar Program Desa Peduli Gambut Badan Restorasi Gambut dapat berjalan sesuai dengan tujuan, menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam restorasi gambut, meningkatkan kapasitas masyarakat serta pemberdayaan ekonomi masyarakat gambut.

1.3 Metodologi dan Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui berbagai cara. Adapun penulisan buku ini yaitu dengan studi literatur, observasi, diskusi dan wawancara. Studi literatur diperoleh dari tulisan-tulisan ilmiah yang berkenaan dengan restorasi gambut. Observasi dengan mengamati keadaan gambut yang telah ataupun belum direklamasi untuk kepentingan usaha masyarakat maupun pengusaha perkebunan. Adapun diskusi dan wawancara melibatkan pihak-pihak sebagai sumber informasi terhadap penulisan buku ini.

1. Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder sangat dibutuhkan dalam penyusunan dokumen Laporan Pemetaan Sosial ini. Data sekunder yang dikumpulkan berupa Renstra, dan Monografi yang relevan dalam bahan Penyusunan Laporan.

2. Diskusi Terpimpin (FGD)

Diskusi terpimpin (FGD) melibatkan anggota yang berasal dari masyarakat Kelurahan Bahaur Basantan yang telah dipilih berdasarkan keterwakilan kelompok yang ada di Kelurahan yaitu Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Aparatur Kelurahan, Ketua Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan masyarakat Kelurahan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Setelah itu, mencatat proses diskusi dan kemudian memberikan komentar mengenai hasil pengamatan.

3. Observasi dan Dokumentasi

Pengamatan lapangan yang disertai dokumentasi dilakukan untuk mengetahui pola nyata yang terjadi di dalam masyarakat Desa dan juga memberikan imajinasi dari kondisi Desa yang sebenarnya.

1.4 Struktur Laporan

Berikut ini struktur laporan yang terdiri dari 13 (tiga belas) bab, yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN.

Memuat latar belakang, tujuan dibuatnya profil desa, metode pengumpulan data, dan struktur penyajian profil desa.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI.

Menunjukkan letak desa, menjelaskan jarak orbitrasi desa ke pusat-pusat pemerintahan atau ekonomi (jarak desa ke kecamatan, desa tetangga, kabupaten, dan ke ibukota provinsi), menunjukkan dan menjelaskan batas dan luas wilayah desa, serta fasilitas umum dan sosial yang terdapat di desa tersebut.

BAB III LINGKUNGAN FISIK DAN EKOSISTEM GAMBUT.

Memuat tentang topografi, geomorfologi dan jenis tanah yang ada di wilayah desa, iklim dan cuaca, keanekaragaman hayati, vegetasi, kondisi hidrologi di lahan gambut, serta kondisi dari kerentanan ekosistem gambut.

BAB IV KEPENDUDUKAN.

Memuat tentang data umum penduduk, struktur penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin, laju pertumbuhan dari masyarakat di desa, dan tingkat kepadatan di desa tersebut.

BAB V KESEHATAN DAN PENDIDIKAN.

Mendeskripsikan tentang sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, kondisi ketersediaan tenaga pendidik dan kesehatan, tingkat partisipasi pendidikan warga, serta kesiapan fasilitas kesehatan menghadapi kebakaran gambut.

BAB VI KESEJARAHAN DAN KEBUDAYAAN MASYARAKAT.

Memuat tentang sejarah desa/komunitas/permukiman, etnis yang ada di desa tersebut, bahasa yang digunakan, religi yang dianut, kesenian yang pernah ataupun yang masih dipraktikkan, serta kearifan dan pengetahuan local yang dimiliki oleh masyarakat yang berkaitan dengan bagaimana mereka menjalani kehidupan sehari-harinya (tidak hanya yang berkaitan dengan seni tetapi juga aktivitas ekonomi seperti bercocok tanam, mencari ikan, dan lain-lain).

BAB VII PEMERINTAH DAN KEPEMIMPINAN.

Menjelaskan tentang bagaimana proses dan perjalanan pemerintahan desa terbentuk, struktur pemerintahan di desa yang ada saat pemetaan dilakukan, bentuk dan penjelasan mengenai peran dan subjek dari kepemimpinan local/tradisional, serta actor yang berpengaruh di desa tersebut di setiap sector, baik itu ekonomi, politik, actor yang berpengaruh di kalangan perempuan, dan sebagainya.

BAB VIII KELEMBAGAAN SOSIAL.

Menjelaskan tentang organisasi sosial formal dan organisasi sosial informal yang ada di desa serta manfaat dan perannya bagi warga, juga jejaring warga yang menjelaskan bagaimana kedekatan antar lembaga tersebut dengan warga di desa.

BAB IX PEREKONOMIAN DESA/KOMUNITAS.

Memuat tentang pendapatan dan belanja desa selama 3-5 tahun terakhir, aset-aset yang dimiliki oleh desa beserta dengan penjelasan dari masing-masing kondisi dan fungsi dari aset desa tersebut, tingkat pendapatan warga beserta penjelasan mata pencaharian dari warga yang ada di desa tersebut, industri dan pengolahan yang ada di desa, serta potensi dan masalah dalam sector pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, dan lain-lain yang ada di desa.

BAB X PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN TANAH & SUMBER DAYA ALAM.

Menjelaskan tentang pemanfaatan lahan (*land use*), penguasaan lahan dan bentuk pengakuan, penguasaan lahan gambut dan parit/handil, peralihan hak atas tanah (termasuk di lahan gambut) dan sengketa di lahan gambut dan non-gambut.

BAB XI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN.

Penjelasan mengenai pembangunan dengan pendanaan dari Negara dan inisiatif pihak lain dalam bentuk kerjasama program.

BAB XII PERSEPSI TERHADAP RESTORASI GAMBUT.

Memuat tentang persepsi masyarakat desa terhadap restorasi gambut yang diwakili tiap komunitas dan perwakilan setiap gender yang ada di desa.

BAB XIII PENUTUP.

Berisi tentang kesimpulan dan saran.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

(Peta, foto, dan lain-lain).



Bab II

Gambaran Umum Lokasi

2.1 Lokasi Desa

Desa Pulau Limbung terletak di 0°13'52.000" LS dan 109°48'54.000" BT. Desa Pulau Limbung merupakan salah satu desa di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Desa Pulau Limbung terdiri dari 5 dusun dan 15 RT. Dusun yang berada di wilayah Desa Pulau Limbung antara lain Dusun Tabau Makmur, Dusun Karya Bersama, Dusun Teluk Raya, Dusun Sedayu Mandiri dan Dusun Selat Karya. Walaupun Desa Pulau Limbung terdapat di Kecamatan pusat pemerintahan Kabupaten namun akses dari dan ke Kecamatan Sungai Raya cukup jauh. Sehingga terjadi kesenjangan kehidupan ekonomi dengan desa di kecamatan yang sama.

2.2 Orbitasi

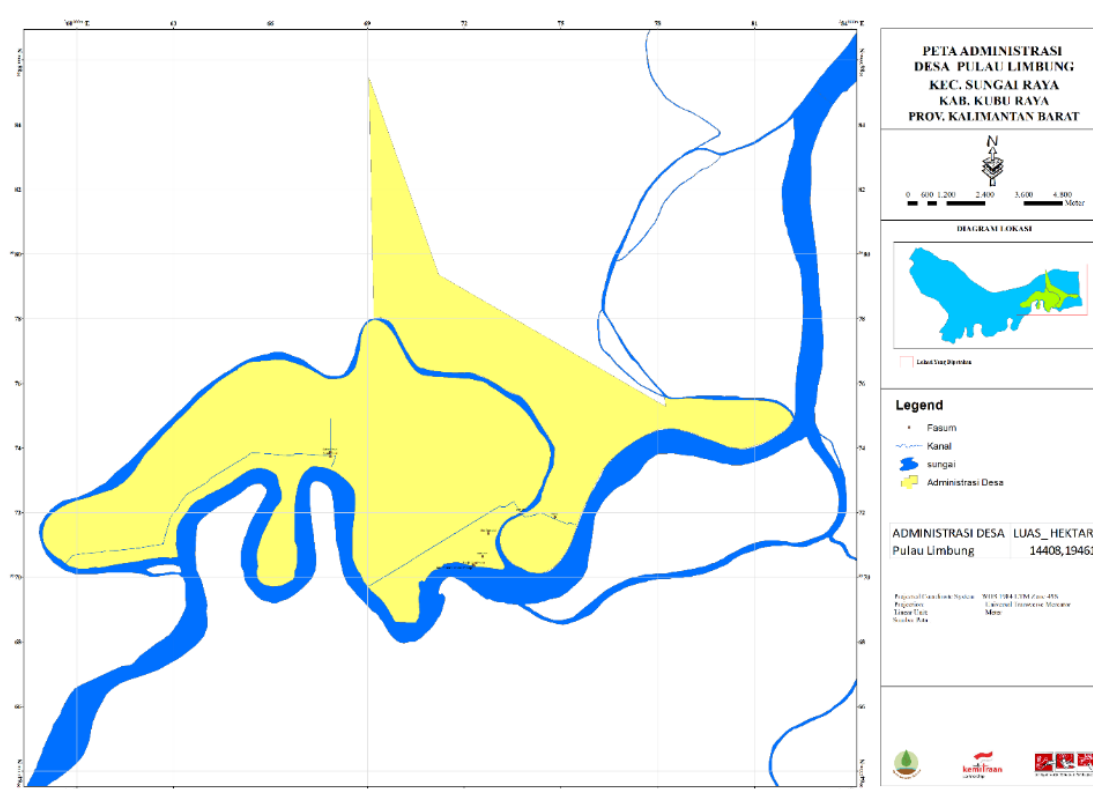
Pemukiman masyarakat Desa Pulau Limbung umumnya di pesisir sungai kapuas. Akses menuju Desa Pulau Limbung dapat ditempuh melalui transportasi darat dan sungai. Sarana transportasi dapat berupa kapal bermotor (klotok) atau *speedboat*. Jarak antara ibu kota kabupaten 97 km dengan waktu tempuh $\pm 2,5$ jam menggunakan *speedboat*. Sebelum adanya perusahaan perkebunan PT. Sawit Jaya Makmur (SJM) dan PT. Kusuma Alam Sari (KAS), akses sungai merupakan jalur andalan masyarakat. Namun setelah dua perusahaan tersebut mengekspansi wilayah Desa Pulau Limbung dan desa-desa sekitarnya turut berdampak terhadap pembangunan akses darat menuju dan dari Desa Pulau Limbung. Jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dan provinsi ± 100 km dengan waktu ± 3 jam perjalanan. Sarana transportasinya bisa dengan bis, travel ataupun sepeda motor.

2.3 Batas dan Luas Wilayah

Secara administrasi Desa Pulau Limbung berada di wilayah Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan Kecamatan Dalam Angka (2017) batas Desa Pulau Limbung antara lain:

Sebelah Utara	: Desa Gunung Tamang
Sebelah Selatan	: Desa Betuah Kecamatan Terentang
Sebelah Timur	: Desa Pulau Jambu
Sebelah Barat	: Desa Muara Baru Kecamatan Terentang
Luas wilayah Desa Pulau Limbung ± 11.233,62 Ha	

Gambar 1. Batas dan Luas Wilayah Desa Pulau Limbung



2.4 Fasilitas Umum dan Sosial

Fasilitas umum adalah fasilitas yang diadakan untuk kepentingan umum. Contoh dari fasilitas umum (fasum) adalah seperti jalan, angkutan umum, saluran air, jembatan, fly over, under pass, halte, alat penerangan umum, jaringan listrik, banjir kanal, trotoar, jalur busway, tempat pembuangan sampah, dan lain sebagainya. Sedangkan, fasilitas sosial adalah fasilitas yang diadakan oleh pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam lingkungan pemukiman. Contoh dari fasilitas sosial (fasos) adalah seperti puskesmas, klinik, sekolah, tempat ibadah, pasar, tempat rekreasi, taman bermain, tempat olahraga, ruang serbaguna, makam, dan lain sebagainya.

Fasilitas umum yang terdapat di Desa Pulau Limbung terdiri dari satu jalantitankomposit sebagai penghubung pemukiman warga. Jalan titian komposit atau lebih dikenal dengan gertak merupakan jalan yang umumnya terdapat di pemukiman pesisir sungai. Dahulu, jalan ini disebut gertak karena dibuat dari material kayu. Saat ini jalan yang terlihat seperti jembatan panjang ini telah diperkeras dengan material komposit (beton) agar lebih tahan lama.

Jalan titian komposit ini menghubungkan Dusun Tabau Makmur, Dusun Karya Bersama dan Dusun Teluk Raya sepanjang 2,1 km. Terdapat juga satu jalan titian komposit terletak di Dusun Sedayu Mandiri dan satu jalan titian komposit terletak di Dusun Selat Karya. Untuk menuju Desa Pulau Limbung transportasi darat melalui jalan yang dibuat oleh perusahaan perkebunan swasta PT. SJM dan PT.KAS. Karena Desa Pulau Limbung merupakan daratan pulau yang dikelilingi sungai terdapat juga jembatan penghubung yang dibuat dari ponton. Jembatan ini merupakan program dari perusahaan PT.SJM yang dapat menghubungkan Dusun Tabau Makmur, Dusun Karya Bersama, Dusun Teluk Karya Dan Dusun Sedayu Mandiri.

Terdapat juga tenaga pembangkit diesel milik PLN yang menjadi sumber penerangan warga yang hanya hidup malam hari. Sejak 1995 warga sudah menikmati fasilitas listrik ini namun hanya bisa dinikmati warga di Dusun Tabau Makmur, Dusun Karya Bersama dan Dusun Teluk Raya. Sedangkan dua dusun lainnya yakni Dusun Selat Karya dan Dusun Sedayu Mandiri masih menggunakan mesin genset pribadi. Fasilitas untuk menunjang komunikasi di Desa Pulau Limbung terdapat satu unit menara BTS (Base Transceiver station) Indosat yang masih berfungsi dengan baik. Tower Indosat ini aktivitasnya dimulai di tahun 2015 dan berdiri di Dusun Tabau Makmur. Fasilitas transportasi yang mendukung akses masyarakat desa pulau limbung menggunakan speedboat apabila melalui sungai. Bis dan travel juga sudah tersedia guna memudahkan masyarakat apabila ingin bepergian via jalan darat.

Fasilitas sosial terdiri dari SDN 11 terletak di Dusun Teluk Raya, SDN 43 terletak di Dusun Selat Karya, SMPN 08 terletak di Dusun Teluk Raya, PAUD Al-Hikmah terletak di Dusun Teluk Raya, Kondisi semua fasilitas sekolah dan pendidikan sampai sekarang masih baik. di Dusun Tabau Makmur dengan kondisi baik di Dusun Selat Karya dengan kondisi kurang baik karena tidak ada tenaga kesehatan yang bertugas sehingga bangunan terkesan seperti tidak terawat di Dusun Teluk Raya dengan kondisi baik.

Masjid terdapat di Dusun Teluk Raya, Selat Karya dan Sedayu Mandiri (3 unit), Surau/Mushola (2 unit di Dusun Karya Bersama, 1 Unit di Dusun Teluk Raya dan Tabau Makmur) 4 unit, Gereja di Dusun Teluk Karya 1 unit, Poskesdes 1 unit, Polindes 1 unit, Puskesmas 1 unit, di Dusun Teluk Raya Gedung TMB (Taman Baca Masyarakat) 1 unit, masing-masing di Dusun Tabau Makmur, Selat Karya dan Sedayu Mandiri yang ada di Dusun Karya Bersama, Sedayu Mandiri dan Selat Karya.



Bab III

Lingkungan Fisik dan Ekosistem Gambut

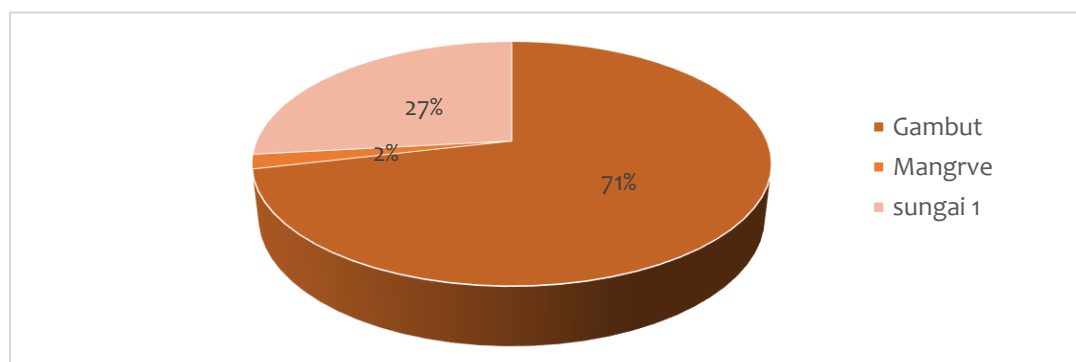
3.1 Topografi

Topografi merupakan gambaran variabilitas permukaan bumi, yang biasanya berasosiasi dengan ciri-ciri bentuk permukaan seperti variasi relief suatu daerah. Untuk menggambarkan secara lebih sederhana dapat digunakan pengertian-pengertian bentang lahan, seperti perbukitan, lembah dan dataran. Adapun Topografi Desa Pulau Limbung adalah dataran rendah. Kemiringan lereng Desa Pulau Limbung antara 0-8% dengan klasifikasi datar (Pedoman Penyusunan Pola Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah, 1986).

3.2 Geomorfologi dan Jenis Tanah

Geomorfologi Desa Pulau Limbung terdiri atas bentukan aluvial dan gambut. Aluvial adalah jenis tanah yang terbentuk karena endapan. Daerah endapan terjadi di sungai, danau yang berada di dataran rendah, ataupun cekungan yang memungkinkan terjadinya endapan. Dataran aluvial di Desa Pulau Limbung hanya 20% dari total luas desa. Dataran gambut lebih mendominasi, sekiranya 80% wilayah Desa Pulau Limbung adalah gambut.

Gambar 2. Grafik Jenis Tanah Desa Pulau Limbung



3.3 Iklim dan Cuaca

Iklim dan cuaca di Desa Pulau Limbung adalah beriklim tropis. Berikut data curah hujan, temperatur udara, dan kecepatan angin di Kecamatan Sungai Raya (Badan Meteorologi dan Geofisika Supadio, 2016)

Tabel 1. Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan di Kecamatan Sungai Raya Tahun 2016

No	Bulan	Curah Hujan	Hari Hujan
1	Januari	402,1 mm	27 hari
2	Februari	546,5 mm	26 hari
3	Maret	549,3 mm	26 hari
4	April	248,0 mm	24 hari
5	Mei	705,0 mm	27 hari
6	Juni	461,4 mm	16 hari
7	Juli	349,1 mm	17 hari
8	Agustus	40,1 mm	7 hari
9	September	297,7 mm	20 hari
10	Oktober	382,2 mm	22 hari
11	Nopember	355,3 mm	24 hari
12	Desember	570,9 mm	21 hari

No	Tahun	Curah Hujan	Hari Hujan
I	2016	4907,6 mm	257 hari
II	2015	2757,6 mm	206 hari
III	2014	2755,0 mm	217 hari
IV	2013	3382,0 mm	227 hari
V	2012	3082,1 mm	219 hari

Sumber: Stasiun Badan Meteorologi dan Geofisika Supadio, 2016

Data di atas menunjukkan bahwa curah hujan di Kecamatan Sungai Raya termasuk Desa Pulau Limbung tahun 2016 tertinggi di bulan Mei sebesar 705,0 mm dengan 27 hari hujan dan terendah pada bulan Agustus sebesar 40,1 mm dengan 7 hari hujan. Selama 5 tahun, dari 2012 sampai 2016 curah hujan tertinggi di tahun 2016 dengan total curah hujan 4.907,6 mm dan 257 hari hujan. Di bawah ini data kondisi cuaca Kecamatan Sungai Raya di tahun 2016

Tabel 2. Kecepatan Angin dan Temperatur Udara di Kecamatan Sungai Raya Tahun 2016

No	Bulan	Kecepatan Angin (Knots)		Temperatur Udara (°C)		
		Max	Rerata	Max	Min	Rerata
1	Januari	32	4	31,6	24,0	27,0
2	Februari	35	4	32,3	24,0	26,9
3	Maret	26	4	31,9	23,7	27,3
4	April	25	3	33,4	24,4	27,8
5	Mei	21	3	32,9	24,2	27,4
6	Juni	26	4	31,5	23,9	27,5
7	Juli	20	5	33,4	23,7	27,4
8	Agustus	35	7	33,6	23,6	27,6
9	September	26	7	33,4	23,8	27,3
10	Oktober	25	5	32,3	23,8	27,0
11	Nopember	22	4	32,4	23,9	26,8
12	Desember	34	6	31,9	23,7	26,6


















No	Tahun	Kecepatan Angin (Knots)		Temperatur Udara (°C)		
		Max	Rerata	Max	Rerata	Max
I	2016	4907,6	257	23,5	23,9	27,2
II	2015	2757,6	206	34,6	23,6	26,9
III	2014	2755,0	217	32,4	23,5	26,8
IV	2013	3382,0	227	32,4	23,5	26,9
V	2012	3082,1	219	32,7	23,5	27,1

Sumber: Stasiun Badan Meteorologi dan Geofisika Supadio, 2016

Tabel di atas menunjukkan kecepatan angin dan temperatur udara rata-rata harian di tahun 2016. Kecepatan angin tertinggi rata-rata terjadi dibulan Agustus dan September yaitu 7 knots dengan tertinggi dibulan Februari dan Agustus. Sedangkan suhu rata-rata tertinggi dibulan April sebesar 27,8°C dengan suhu tertinggi harian terjadi di bulan Agustus yaitu 33,6°C dan terendah dibulan Desember 26,6°C. Dalam 5 tahun terakhir Kecamatan Sungai Raya temperatur tertinggi terjadi pada tahun 2015 dengan 34,6°C dan terendah di tahun 2012 s/d 2014 yaitu 23,5°C.

Pada kalender musim bisa di lihat di tabel di atas yang merupakan musim penghujan terbiasa di bulan januari, ferbruari, maret dan april yang merupakan cocok di komoditas dominan Padi di mulai dari februari dengan pembersihan lahan sampai bulan april kemudian di lanjutkan dengan persiapan lahan tanam dari mulai mei sampai juli seterusnya penanaman satu bulan di bulan agustus dan dilakukan perawatan dilakukan sampai bulan desember dengan perawatan yang panjang sampai 4 bulan membuat panen meningkat, namun kendala yang biasa di komoditas padi ini adalah hama, banjir dan pemasaran.

Tabel 3. Kalender Musim

		KALENDER MUSIM													
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	Peluang	Masalah
Musim														-	-
Kerawanan Kebakaran		-	-	-	-						-	-	-	-	-
Komoniditas	Padi	-	Pembersihan lahan	Pembersihan lahan	Pembersihan Lahan	Persiapan Lahan	Persiapan Lahan	Persiapan Lahan	Tanam	Perawatan	Perawatan	Perawatan	Perawatan	Panen Meningkatkan	* Hama * Banjir * Pemasaran
	Jagung	-	-	-	-	Persiapan Lahan	Tanam	Perawatan	Perawatan	Perawatan	Panen	-	-	Panen Meningkatkan	* Hama * Banjir * Pemasaran
	Semangka	-	-	-	Persiapan Lahan	Tanam	Perawatan	Perawatan	Panen	-	-	-	-	Panen Meningkatkan	* Hama * Banjir * Pemasaran
	Timun	-	-	-	Persiapan Lahan	Tanam	Perawatan	Panen	-	-	-	-	-	Panen Meningkatkan	* Hama * Banjir * Pemasaran
	Cabe	-	-	-	Persiapan media tanam	Tanam	Perawatan	Panen	-	-	-	-	-	Panen Meningkatkan	* Hama * Banjir * Pemasaran

3.4 Keanekaragaman Hayati

Berdasarkan hasil FGD (Forum Grup Discussion), pengamatan dan wawancara dengan masyarakat, keanekaragaman hayati di Desa Pulau Limbung cukup beragam. Antara lain Jenis Flora di Desa Pulau Limbung terdiri atas Rotan, Rengas, Mabang, Bentangor, Ramin, Pelaek, Kekapas, Kabu-Kabu, Medang, Meranti, namun sudah hampir langka dan hilang menurut table di atas dari tahun 1997-2017 terus menurun antara lain: Mabang, Rengas, Ramin, Meranti, Kempas, Kayu Ara, dan Jelutung, sedangkan kelapa sawit yang merupakan jenis vegetasi terus meningkat seiring harga sawit yang makin mahal. Sedangkan Karet dan Padi terus menurun kendalanya harga karet yang murah dan lahan padi yang selalu banjir.

Tabel 4. Jenis Keanekaragaman Hayati dan Vegetasi

Ragam hayati	Periode			Keterangan
	1997-2003	2004-2010	2011-2017	
Flora				
Mabang				Penebangan liar dan aktifitas perusahaan
Meranti				Penebangan liar dan aktifitas perusahaan
Ramin				Penebangan liar dan aktifitas perusahaan
Rengas				Penebangan liar dan aktifitas perusahaan
Kempas				Penebangan liar dan aktifitas perusahaan
Kayu ara				Penebangan liar dan aktifitas perusahaan
Jelutung				Penebangan liar dan aktifitas perusahaan
Fauna				
Rusa				ekosistem rusak, penebangan liar & aktifitas perusahaan
Pelanduk / kelinci				ekosistem rusak, penebangan liar & aktifitas perusahaan
Landak				ekosistem rusak, penebangan liar & aktifitas perusahaan
Trangiling				ekosistem rusak, penebangan liar & aktifitas perusahaan
Orang Utan				ekosistem rusak, penebangan liar & aktifitas perusahaan
Beruang				ekosistem rusak, penebangan liar & aktifitas perusahaan
Ayam hutan				ekosistem rusak, penebangan liar & aktifitas perusahaan
Tokek				ekosistem rusak, penebangan liar & aktifitas perusahaan
Burung Enggang				ekosistem rusak, penebangan liar & aktifitas perusahaan
Burung tiong				ekosistem rusak, penebangan liar & aktifitas perusahaan
Vegetasi				
Karet				Menurunnya harga karet
Sawit				Meningkatnya harga sawit
Padi				Banjir

Fauna; Rusa, Kancil, Orang Utan, Kera, Monyet, Berang-Berang, Biawak, Rangkong, Enggang Patok Putih dan Merah, Murai Batu, Kacer, Punai, Elang, Bangau, Burung Madu, Bubut, Burung Pelatuk, Tekukur, Peregam dan jenis-jenis ikan yang umumnya adalah segala jenis ikan air tawar seperti baung, toman, gabus, biawan, tapah, udang galah dan lain-lain.

Di Desa Pulau Limbung juga terdapat buaya yang habitatnya di sungai kapuas dan danau-danau yang jarang terdapat aktivitas manusia. Namun yang terjadi penurunan jumlah habitatnya dari tahun 1997-2017 antara lain: rusa, planduk/kelinci, landak, trangling, orang hutan, beruang, ayam hutan, tokek, burung enggang, burung tiong.

Jenis buah-buahan yang ada di desa pulau limbung antara lain; Nanas, Semangka, Pisang, Cempedak, Durian, Sirsak, Rambutan. Tanaman Obat-Obatan; Sirih Merah, Sirih, Serai, Temulawak, Jahe dan Mengkudu.

Hutan lindung gambut yang keberadaannya sangat penting dalam menjaga ekosistem lahan gambut. Di dalam hutan lindung ini terdapat berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan hutan seperti rotan, mabang, ramin, medang, bentangor nibung dan lain-lain. Selain itu pengebangan liar dan aktifitas perusahaan, vegetasi kelapa sawit juga menutupi sebagian besar di lahan di Desa Pulau Limbung atas adanya konsesi perkebunan milik PT. Sawit Jaya Makmur (SJM). Di areal PT. SJM inilah pernah terjadi kebakaran lahan gambut di tahun 2015 dan 2016. Tidak terdapat informasi yang lebih terperinci tentang berapa luas areal yang terbakar tersebut.

3.5 Hidrologi di Lahan Gambut

Lahan Gambut di Desa Pulau Limbung penggunaannya hampir dikuasai penuh PT. SJM. Perusahaan yang merupakan anak perusahaan dari Alas Kusuma Group. Alas Kusuma Group merupakan salah satu perusahaan pengelolaan hasil hutan ternama di Kalimantan Barat. PT. SJM mulai melakukan penanaman kelapa sawit perdana di tahun 2012 di Dusun Selat Karya. Karena sebagian besar areal PT. SJM adalah lahan gambut, maka pembukaan lahan menggunakan kanal atau parit. Kanal ini dibuat guna menjaga ketinggian muka air agar tidak tergenang dikala musim hujan dan tidak kehilangan air pada musim kemarau. Menjaga permukaan air di lahan gambut sangat penting dalam rangka menjaga gambut agar tetap berkelanjutan.

PT. SJM membuat sekitar 125 sekat kanal dan sekat kanal pembatas antara Hak Guna Usaha (HGU) PT. SJM dan Hutan Lindung serta dan Lahan masyarakat baik yang sudah dan belum dikelola. Tipe kanal yang dibuat oleh PT. SJM ini berupa galian *boundary* (batas), parit blok, dan parit dalam blok atau saluran tersier. Kanal *boundary* dibuat mengelilingi seluruh areal PT. SJM yang muaranya langsung menuju ke sungai kapuas. Tipe galian ini dengan ukuran lebar 4 m dengan kedalaman lebih dari 8 m.

Sedangkan kanal blok adalah sekat pemisah antar blok satu dengan blok lainnya. Umumnya kanal ini dengan ukuran lebar 2 m dan kedalaman 2 m dan saling bertemu dengan kanal blok lainnya. Adapun kanal tersier atau sering disebut parit cacing adalah kanal yang dibuat sejajar dengan baris tanaman. Kanal tersier ini cukup berperan dalam pengaturan drainase dan menjaga permukaan air tanah di lahan gambut. Muara dari kanal tersier adalah kanal blok. Tipe dari kanal tersier dibuat tegak lurus parit blok dengan rentang 2 s/d 8 baris tanaman per 1 kanal dengan ukuran lebar 1-2 m.

3.6 Kerentanan Ekosistem Gambut

Gambut memiliki peranan sangat penting dalam menjaga fungsi hidrologis dan ekologis dalam suatu kawasan. Lahan gambut tidak boleh dibiarkan kering karena sangat beresiko terjadinya kebakaran yang berdampak sangat sistemik terhadap kehidupan manusia. Lahan gambut di Desa Pulau Limbung rawan terjadi kebakaran semua titik pada musim kemarau, baik lahan gambut yang terletak di PT.SJM, hutan lindung, maupun lahan masyarakat. Penyebab yang paling kelihatan adanya penebangan pohon dan aktivitas perusahaan demi mencari keuntungan dengan mengorbankan ekosistem gambut.

Sejak adanya PT.SJM di Desa Pulau Limbung dari 2012 hampir setiap tahunnya terjadi kebakaran lahan gambut pada musim kemarau. Lahan yang sering mengalami kebakaran umumnya areal yang telah ditanami. Penyebab kebakaran ini yaitu adanya aktivitas manusia di perkebunan kelapa sawit. Kelalaian dari pihak perusahaan juga dapat menambah parah dampak kebakaran gambut tersebut. Kelalaian berupa kurangnya perhatian dalam menjaga air di kanal-kanal sehingga pada saat kemarau terjadi penurunan permukaan air secara drastis dan kurangnya pelatihan kesiap siagaan dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan.



Bab IV Kependudukan

4.1 Data Umum Penduduk

Berdasarkan Kecamatan Dalam Angka (2017) Desa Pulau Limbung jumlah penduduk sebanyak 2.462 Jiwa dengan penduduk perempuan 1.142 jiwa dan laki-laki 1.320 jiwa. Jumlah kepala keluarga sebanyak 548 Kepala Keluarga. Jumlah kepala keluarga laki-laki sebanyak 648 kepala keluarga. Jumlah kepala keluarga perempuan sebanyak 60 kepala keluarga.

Tabel 5. Jumlah Penduduk Desa Pulau Limbung Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	(Jiwa)	Persentase (%)
Laki-Laki	1.320	53,61
Perempuan	1.142	46,39
Total	2.462	100,00

Sumber: Profil Desa Pulau Limbung tahun 2017

Rasio Jenis Kelamin atau biasa disebut Sex Ratio adalah perbandingan antara jumlah banyaknya penduduk laki-laki dengan jumlah banyaknya penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Pada umumnya Rasio Jenis Kelamin atau Sex Ratio dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki dibanding 100 perempuan. Pada umumnya Rasio Jenis Kelamin atau Sex Ratio dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki dibanding 100 perempuan. $\text{Sex Ratio} = (\text{Jumlah banyaknya penduduk laki-laki} / \text{Jumlah banyaknya penduduk perempuan}) \times 100$. Berdasarkan pada tabel 5. jumlah penduduk Desa Pulau Limbung didominasi oleh jenis laki-laki dengan perbandingan sex ratio = $(1.320 \text{ jiwa} : 1.142 \text{ jiwa}) \times 100 = 115,59$ dibulatkan menjadi 116 orang. Dari data perhitungan sex ratio dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2017, untuk setiap 100 orang perempuan terdapat 116 orang laki-laki.

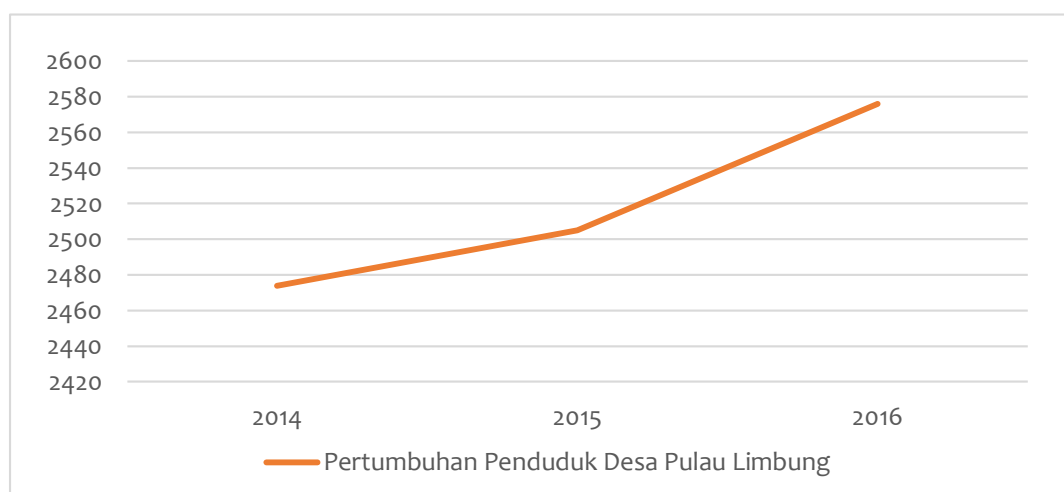
4.2 Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju Pertumbuhan penduduk adalah bertambahnya jumlah penduduk yang selalu lebih kepada meningkatnya jumlah setiap tahunnya. Perhitungan pertumbuhan penduduk secara alami dapat dihitung dengan mengetahui terlebih dahulu angka kelahiran dan kematian. Pertumbuhan penduduk ini dinyatakan dengan persen (%). Berdasarkan data yang diperoleh angka kelahiran di Desa Pulau Limbung adalah 23 Sedangkan angka kematian di tahun 2016 sebesar 17. Dari total 2.414 penduduk Desa Pulau Limbung dapat diperoleh angka pertumbuhan penduduk sebesar 0,06 %.

Tabel 6. Jumlah Penduduk Desa Pulau Limbung Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk Tahun Ini	Jumlah Penduduk Tahun Lalu	Jumlah Pertumbuhan (%)
1	Pulau Limbung	2.474	2.546	2.91

Gambar 3. Grafik Pertumbuhan Penduduk Desa Pulau Limbung



4.3 Tingkat Kepadatan Penduduk

Tingkat kepadatan penduduk ini secara umum dapat diartikan sebagai perbandingan dari banyaknya jumlah penduduk dengan luas daerah atau wilayah yang ditempati berdasarkan satuan luas tertentu. Dengan Kepadatan penduduk ini menunjukkan ketersediaan areal pemukiman dalam suatu wilayah. Jumlah penduduk (2.462) / Luas Desa Pulau Limbung ($\pm 11.233,62$ Ha) = 0,2 Jiwa / Ha. Artinya dalam satu jiwa dapat menempati lahan seluas 5 ha. Kesimpulannya adalah kategori kepadatan penduduk di Desa Pulau Limbung adalah sangat jarang.



Bab V

Pendidikan dan Kesehatan

5.1 Jumlah Tenaga Pendidikan dan Tenaga Kesehatan

Tenaga pendidik dan kesehatan sangat memiliki peranan penting di suatu wilayah pemerintahan lebih khusus di Desa Pulau Limbung. Terlebih Desa Pulau Limbung merupakan desa terluar dari Kabupaten Kubu Raya. Adapun ketersediaan tenaga pendidikan di Desa Pulau Limbung sangat minim sekali, dapat dilihat di tabel bawah ini.

Tabel 7. Ketersediaan Tenaga Pendidik Desa Pulau Limbung

Nama Satuan Pendidikan dan Kesehatan	Jumlah Tenaga
SDN 11 Sungai Raya	8 Orang (2 PNS, 6 Honorer)
SDN 43 Sungai Raya	6 Orang (4 PNS, 2 Honorer)
SMP N 8 Sungai Raya	5 Orang (2 PNS, 3 Honorer)
SMK N 03 Sungai Raya	8 Orang (4 PNS, 4 Honorer)
PAUD Al-Hikmah	2 orang (Honorer)

Sumber : Data Wawancara

Dari tabel di atas dapat bisa kita lihat ternyata dengan luas wilayah desa (\pm 11.233,62 Ha) dan terdapatnya 5 dusun yang ada di desa pulau limbung termasuk 2 dusun terluar dari desa yaitu dusun sedayu mandiri dan selat karya perlu ada nya penambahan tenaga pendidik sebagai proses peningkatan pendidikan di desa terutama di Sekolah Dasar yang merupakan jenjang pendidikan dasar pada status pendidikan. Dengan berdirinya SMK Negeri 03 Kec.Sungai Raya pada tahun 2017 menjadikan semangat baru di dunia pendidikan di desa pulau limbung dengan terdapat 3 jurusan: pertanian, perikanan, dan tata boga

Tenaga pendidik yang ada di Desa Pulau Limbung dari keaktifannya dapat dikatakan aktif. Namun, masih ada beberapa tenaga guru yang berstatus PNS terutama di SDN 43 yang letaknya di Dusun Selat Karya jarang datang mengajar. Sedangkan di SDN 11 yang memiliki 2 Guru PNS membuat mekanisme secara bergantian dalam kehadiran mengajar. Dalam 1 bulan, masing-masing mengajar selama 14 hari. Hal ini dibuat agar tidak adanya kekosongan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Di SMPN 8 untuk keaktifan tenaga guru sampai sekarang sudah cukup aktif. Sama halnya dengan tenaga kesehatan, 2 bidan yang menjadi andalan masyarakat untuk pemenuhan jasa kesehatan ini selalu stanby melayani warga. Hanya meninggalkan lokasi apabila ada agenda di Ibu Kota Kabupaten.

2 tenaga kesehatan masih sangat kurang dalam melayani >2.000 penduduk yang ada di Desa Pulau Limbung. Perlu adanya kebijakan dari pemerintah agar warga dapat merasakan layanan kesehatan yang sebaik-baiknya. Dapat di lihat di tabel yang ada di bawah ini:

Tabel 8. Jumlah Tenaga Kesehatan Desa Pulau limbung

Sarana Kesehatan	Jumlah
Puskesmas	2 Bidan
Pustu	
Posyandu	

Sumber : Data Wawancara

Selain itu juga lemahnya dukungan dari fasilitas alat medis yang ada di puskesmas. Dari data yang kami dapat fasilitas alat yang tersedia hanya sebuah alat timbangan sementara alat yang tidak tersedia tensi, timbangan bayi, pengukur tinggi badan.

Selain itu juga dari 2 petugas kesehatan ini pun di bantu oleh 5 orang sukarelawan dari masyarakat di tiap-tiap dusun sebagai kelompok tenaga posyandu desa pulau limbung. Untuk obat-obatan masih di suplay dari puskesmas unit yang ada di desa sungai asam. Secara letak geografis, wilayah desa pulau limbung di tambah dekat dengan desa gunung tamang, desa betuah, desa pulau jambu. Sudah bisa di ajukan ke pemerintah daerah kabupaten kubu raya untuk di bangunnya puskesmas sebagai sarana dan prasarana kebutuhan akan kesehatan untuk masyarakat.

5.2 Kondisi Fasilitas Pendidikan dan Fasilitas Kesehatan

Kondisi fisik fasilitas pendidikan dan kesehatan merupakan bagian terpenting sebagai pendukung proses aktivitas pendidikan dan kesehatan. Oleh karenanya sangat penting akan kondisi fisik bangunan demi terciptanya pelayanan dasar prima dalam suatu wilayah atau desa. Adapun kondisi fasilitas pendidikan dan kesehatan yang ada di pulau limbung dapat di lihat di tabel di bawah ini

Tabel 9. Sarana Pendidikan dan Kesehatan Desa Pulau Limbung

Nama Satuan Pendidikan dan Kesehatan	Jumlah	Letak	Kondisi Sarana dan Prasarana
SDN 11 Sungai Raya	1 unit	Dusun Teluk Raya	Baik
SDN 43 Sungai Raya	1 unit	Dusun Selat Karya	Baik
SMP N 8 Sungai Raya	1 unit	Dusun Teluk Raya	Baik
SMK N 03 Sungai Raya	1 unit	Dusun Tabau Raya	Sangat Baik
PAUD Al-Hikmah	1 unit	Dusun Teluk Raya	Baik
Taman Baca Masyarakat	1 unit	Dusun Teluk Raya	Baik
Puskesmas	1 unit	Dusun Tabau Makmur	Baik
	1 unit	Dusun Selat Karya	Baik
Pustu	1 unit	Dusun Teluk Raya	Baik
Pusyandu	1 unit	Dusun Selat Karya	Kurang Baik
	1 unit	Dusun Teluk Raya	Kurang Baik
	1 unit	Dusun Sedayu mandiri	Kurang Baik
	1 unit	Dusun Tabau makmur	Kurang Baik

Sumber : Profil Desa Pulau Limbung

Dari tabel di atas bisa disimpulkan yang tergolong kondisi kurang baik dalam fasilitas kesehatan dalam bentuk fisik bangunan ada di 4 pusyandu di 4 dusun berbeda. Di karenakan bangunan posyandu merupakan bangunan masyarakat yang di pinjamkan secara sukarela untuk kepentingan masyarakat di masing-masing dusun tersebut.

Untuk kondisi fasilitas kesehatan di desa pulau limbung. Ada 2 puskesmas 1 puskesmas terletak di dusun tabau makmur dan 1 puskesmas terletak di dusun selat karya, dengan melayani kesehatan kurang lebih 2000 penduduk desa.

Untuk puskesmas di dusun tabau makmur kondisinya sangat baik dengan 2 ruangan yang tersedia yaitu ruangan tinggal bidan dan ruangan pemeriksaan untuk para pasien. Di bangun pada tahun 2016 yang di peruntukan untuk kepentingan kesehatan masyarakat, dari hasil wawancara dengan bu bidan indri untuk kondisi nyata hanya di bagian teras depan yang kondisi betonnya sudah mulai rusak sehingga dalam kondisi tertentu dapat membahayakan para pasien. Hal yang lain yang di sampaikan bu bidan indri adalah perlengkapan masih kurang memadai antara lain tensi, timbangan bayi, pengukur tinggi badan, meja, dan kursi.

Untuk kondisi bangunan puskesmas di dusun selat karya baik namun cukup lama tidak di tinggalin sehingga ada beberapa bagian mengalami kerusakan. Mempunyai 2 ruangan utama juga antara lain 1 untuk ruangan tinggal bidan dan 1 untuk ruangan pemeriksaan para pasien.

5.3 Angka Partisipasi Pendidikan

Tabel 10. Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar (SD) Desa Pulau Limbung

Jumlah Penduduk Dengan Usia 7-12 Tahun	Jumlah Siswa Sekolah Dasar	Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun yang tidak bersekolah	Angka Partisipasi Murni
230	223	7	96,9%

Tabel 11. Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama (SMP) Desa Pulau Limbung

Jumlah Penduduk Dengan Usia 13-15 Tahun	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun yang tidak bersekolah	Angka Partisipasi Murni
179	95	84	53,07

Untuk angka partisipatif pendidikan murni sekolah dasar dan sekolah menengah pertama merupakan unsur perkembangan pendidikan secara angka mengalami peningkatan kesadaran akan dunia pendidikan di sistem kehidupan masyarakat di desa pulau limbung. Itu bisa kita lihat jelas di tabel yang ada di atas bagaimana persentase angka partisipatif pendidikan murni tingkat sekolah dasar dan tingkat sekolah menengah pertama mengalami peningkatan dan penurunan. Di sekolah dasar sendiri dari jumlah penduduk usia 7-12 tahun berjumlah 230 dengan jumlah bersekolah berjumlah 223 sedangkan yang tidak bersekolah berjumlah 7 orang dengan demikian menunjukkan arti pentingnya sekolah dasar di kehidupan bermasyarakat.

Namun tidak demikian dengan angka partisipatif di sekolah menengah pertama dari jumlah keseluruhan penduduk usia 13-15 tahun yang bersekolah berjumlah 95 orang dan yang tidak bersekolah berjumlah 84 orang ini menunjukkan minat dan kesadaran pendidikan di tingkat sekolah menengah pertama mengalami penurunan di desa pulau limbung.

5.4 Jumlah Korban Bencana Kebakaran dan Asap Tahun 2015

Kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 meninggalkan duka yang mendalam baik bagi bangsa Indonesia maupun internasional (dunia) bagaimana tidak dampak yang paling kelihatan salah satunya adalah lumpuhnya perekonomian di akibatkan transportasi tidak berjalan dengan baik. Yang kesemua itu bersumber dari kebakaran besar dan hebat di tahun 2015. Untuk mengurangi dan jangan sampai terjadi kembali terbentuklah Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia melalui perpres no 1 tahun 2016. Dimana isi pentingnya adalah badan restorasi gambut menjadi koordinasi dan fasilitasi restorasi gambut di 7 provinsi di Indonesia.

Untuk jumlah bencana Kebakaran dan asap 2015. desa pulau limbung tidak mengalami bencana kebakaran namun dampak dari kebakaran yaitu asap, desa pulau limbung merasakan juga seperti belahan pulau indonesia lainnya. Antara lain sulit bernafas dan jarak pandang yang sangat minim sekali sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Tidak dapat di ceritakan lebih banyak di karenakan waktu bencana kebakaran dan asap 2015 puskesmas desa pulau limbung belum berdiri atau ada di desa sehingga data yang di dapat dari jumlah korban tidak ada, namun dari beberapa hasil wawancara, cara sederhana para korban dalam mengatasi sesak dan kabut asap waktu itu dengan membasahi handuk atau kain dan kemudian di tutupkan di sekitaran mulut dan hidung selajutnya bernafas dengan normal. apabila terjadi makin parah masyarakat langsung berobat ke rumah sakit terdekat kabupaten demi untuk mendapatkan perawatan intensip atau berkelanjutan.



Bab VI

Kesejarahan dan Kebudayaan Masyarakat

6.1 Sejarah Desa

Tidak diketahui secara pasti tahun berapa Desa Pulau Limbung dibuka/dirintis. Sebelum zaman penjajahan Belanda wilayah Desa Pulau Limbung sudah ditempati. Menurut cerita orang tua, yang pertama kali menempati wilayah Desa Pulau Limbung adalah Panglima Udin yang berasal dari Desa Limbung (saat ini berada di dekat Bandara Supadio Pontianak). Selain Panglima Udin terdapat juga tokoh awal penduduk Desa Pulau Limbung yang bergelar Dato Kubu. Beliau ini berasal dari Kesultanan Kubu, yaitu kerajaan muslim yang pusat pemerintahannya di Kecamatan Kubu. Tidak didapat informasi yang valid mengenai nama asli Dato Kubu ini dan sejarah kenapa beliau datang ke Pulau Limbung. Situs peninggalan Dato Kubu ini dapat dijumpai berupa makam tua yang terdapat di Tempat Pemakaman Umum di Dusun Karya Bersama. Sudah banyak wilayah Desa yang mekar dari Desa Pulau Limbung, seperti Desa Muara Baru, Desa Pulau Jambu, Desa Gunung Tamang. Secara definitif Desa Pulau Limbung pada tahun 1994.

Cerita lain juga menyatakan Pemukiman warga Pulau Limbung dulunya bertepatan berada di daerah yang sekarang menjadi kuburan dan pemukiman yang sekarang ditepatkan dulunya merupakan lahan perkebunan masyarakat. Orang yang pertama kali menempati Desa Pulau Limbung adalah orang dari arang limbung pontianak yang namanya tidak diketahui karena tetua kampung sudah tidak mampu mengingat terlalu jauh karena faktor usia. di Desa Pulau Limbung terdapat kuburan tua yang merupakan peninggalan sejarah orang zaman dahulu, kuburan tersebut merupakan kuburan Amin Syagaf seorang keturunan kerajaan. banyak cerita-cerita sejarah yang dimiliki Desa Pulau Limbung, entah ini cerita fakta ataupun mitos. percaya atau tidaknya orang-orang zaman dahulu menyakini bahwa cerita-cerita fakta, adapun cerita-cerita tersebut diantaranya:

Untuk struktur pemerintahan pada zaman dahulu tidak ada kepala desa yang ada hanya kepala kampung, namun sekitar tahun dua puluhan baru terbentuk kepala desa tepatnya yang menjabat pertama kali ialah Bapak Tair. setelah beberapa lama pak Tair menjabat ia digantikan oleh Pak Bujang, Dulu kaki tangan kepala desa disebut kebayan.

Dusun selat dulunya adalah hutan rimba. Namun karena adanya serangan penjajah atau disebut jaga lanon, masyarakat dusun selat berusaha mencari tempat perlindungan hingga mereka berinisiatif membuka lahan yang dulunya hutan kini menjadi pemukiman warga belum tahu dipastikan kapan terbentuknya dusun selat karya dan siapa yang menjadi pelopor pertama berdirinya dusun selat karya.

Pada tahun 1972 ada sebuah tragedi yang terjadi di dusun selat karya, tragedi tersebut merupakan tragedi yang sangat menyedihkan dikarenakan hampir setiap harinya memakan korban jiwa, tragedi ini terjadi dikarenakan robohnya sebuah masjid dan oleh orang kampung atap kubah masjid diletakkan disembarang tempat.

Di Dusun Selat Karyaini terdapat kuburan tertua yang menjadi bukti sejarah Dusun Selat Karya. Namun belum diketahui dengan pasti siapa pemilik kuburan tersebut. Di Dusun Selat Karya juga terdapat pantangan-pantangan yang tidak boleh dilanggar oleh warga yaitu pada saat “pengumpanan kampung”. pada saat ini warga masyarakat dilarang untuk bersiul, mengganggu tumbuhan dan hewan selama tiga hari. Di Dusun Selat Karya juga memiliki tradisi menari Zapin yang dipopulerkan oleh para pemuda dan orang tua.

Di Dusun Selat Karya juga terdapat sebuah lagenda buaya kuning yang menjadi misteri bagi warga Dusun Selat Karya. Mengenai berdirinya Desa Pulau Limbung belum diketahui pasti kapan berdirinya, namun menurut pak Samsul Bahri sebagai tetua kampung yang berumur sekitar 104 tahun Desa Pulau Limbung ini berdiri tahaun belasan. Di Desa Pulau Limbung memiliki tradisi tarian sapu tangan makyong yang berdiri sekitar tahun 40-an.

6.2 Etnis, Bahasa, Agama

Dilihat dari jejak sejarahnya, Desa Pulau Limbung merupakan pemukiman di pesisir sungai kapuas mayoritas penduduk aslinya adalah etnis melayu. Disamping etnis melayu, terdapat pula etnis-etnis lain yang bermukim di Desa Pulau Limbung ini diantaranya Dayak, Madura, Bugis, Batak dan Tionghoa. Adanya etnis-etnis lain yang bermukim di Desa Pulau Limbung ini berawal dari pernikahan dengan warga diluar desa yang kemudian menetap di Desa Pulau Limbung. Etnis melayu menempati hampir seluruh wilayah dusun yang ada di Desa Pulau Limbung. Berikut komposisi etnis warga yang ada di Desa Pulau Limbung.

Tabel 12. Jumlah Penyebaran Etnis Warga yang Bermukim di Desa Pulau Limbung

Etnis	Persentase (%)
Kelompok Etnis Melayu	95 %
Kelompok Etnis Madura	2 %
Kelompok Etnis Dayak	2 %
Kelompok Etnis Lain	1 %

Sumber : Profil Desa Pulau Limbung 2017

Bahasa yang digunakan oleh masyarakat Desa Pulau Limbung dalam komunikasi sehari-hari adalah bahasa melayu. Adapun bahasa lain yang digunakan oleh masyarakat seperti bahasa dayak, jawa, dan lain lain digunakan oleh warga yang berkomunikasi antar sesama etnis saja. Namun, apabila bersosialisasi dengan kehidupan masyarakat lain yang beda etnis tetap menggunakan bahasa melayu.

Agama Karena komposisi masyarakat melayu di Desa Pulau Limbung adalah etnis melayu agama yang mayoritas disini adalah Islam. Terdapat juga penganut agama Katholik yang umumnya warga yang beretnis dayak. Namun, tidak terdapat informasi mengenai jumlah penganut agama yang ada dianut oleh masyarakat Desa Pulau Limbung.

6.3 Legenda

Cerita pohon kayu ara dan pohon kedaun, pohon-pohon ini dipercaya memiliki cerita mistis. Dulunya dipohon kedaung pernah terjadi sebuah tragedi yaitu pernah ditemukannya uang perak satu karung tidak diketahui dengan jelas asalnya. Selanjutnya yaitu cerita “pengumpanan kampung” yaitu tidak boleh melayukan atau mengganggu tumbuhan dan hewan selama tiga hari. Namun masih pada saat ini buaya kuning tersebut menampakkan dirinya namun sudah menjadi hal yang tidak heran lagi bagi masyarakat Dusun Selat Karya. selain cerita buaya tersebut terdapat juga sebuah cerita lubang besar didalam air yang konon katanya lubang tersebut tembus dari selat karya menuju keriak bandong. Percaya atau tidak percaya sering para penyelam kayu menemukan benda-benda aneh namun tak satupun dari mereka berani mengambilnya dan memiliki keberanian menelusur lebih dalam lubang tersebut. Selain itu ada juga telaga biru yang konon menurut masyarakat apabila daun-daun yang jatuh di telaga tersebut akan langsung ketepi telaga tanpa mengumpul di tengah telaga.

6.4 Kesenian Tradisional

Kesenian Tradisional yang ada di desa pulau limbung dari dulu memang sudah ada dan sekarang sudah tidak ada sama sekali namun akan di lestarikan kembali adalah yaitu, Tarian makyong memiliki keunikan tersendiri yaitu konon barang siapa yang mendapatkan sapu tangan makyong ia dipersilahkan menari bersama makyong.

Ada lagi kesenian tradisinonal yang sekarang sedang di lestarikan Untuk adat pernikahan pada zaman dahulu dilakukan selama tujuh hari tujuh malam serat dengan tradiisi meliputi berpantun, bersilat, bersyair dan lain-lain. Terdapat kesenian melayu lainnya seperti hadrah (rebana) di Desa Pulau Limbung. Grup hadrah ini beranggotakan empat orang. Grup hadrah ini sering mengisi agenda acara dalam pesta pernikahan dalam hal arak-arakan pengantin pria. Kemudian, biasanya dalam penyambutan tamu-tamu penting atau pejabat yang berkunjung ke Desa Pulau Limbung.

Selain kesenian hadrah, terdapat grup musik bernama Pesona 13 yang dibentuk sejak tahun 2013, kemudian pada tahun 2016 berganti nama menjadi Mitra 2016. Grup musik Mitra 2016 merupakan sarana hiburan bagi masyarakat Desa Pulau Limbung dan sekitarnya. Grup musik ini lebih sering mengisi agenda-agenda dalam pesta pernikahan, pesta HUT kemerdekaan RI dan acara-acara lain yang menggunakan hiburan musik. Personil dari grup musik mitra 16 ini seluruhnya adalah warga Desa Pulau Limbung. Namun, tidak dipungkiri grup ini juga dapat menghadirkan penyanyi-penyanyi dari Ibu Kota Provinsi untuk datang menghibur masyarakat apabila diperlukan. Dalam setiap tampilnya Mitra 16 masyarakat sangat antusias untuk menonton bahkan banyak juga yang ikut bergoyang bersama para penyanyinya.

6.5 Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Kearifan lokal masyarakat Desa Pulau Limbung kecenderungannya sama dengan tradisi masyarakat melayu pada umumnya. Salah satu contoh tradisi melayu yang masih saat ini melekat seperti adanya pantangan bekerja pada tanggal 1 Muharram (tahun baru Islam) dan peringatan robo-robo. Robo-robo adalah tradisi tahunan yang dilaksanakan pada hari rabu di akhir bulan safar kalender hijriyah. Peringatan robo-robo berisikan acara doa bersama kemudian menyantap hidangan yang dilakukan di jalan oleh masyarakat Desa Pulau Limbung. Disini warga saling bisa mencicipi makanan dari warga lainnya tanpa ada batasan dan perbedaan. Yang tidak kalah menariknya di masyarakat pulau limbung mengenal tradisi apabila ada warga yang meninggal, secara bersamaan tidak melakukan kegiatan berkerja di perusahaan, sebagai penghormatan kepada keluarga yang meninggal.

Berkenaan dengan kearifan lokal lain dalam pemanfaatan lahan, warga Desa Pulau Limbung sering melakukan gotong royong menanam padi saat musim tanam tiba. Lebih dari 20 warga kadang turut dalam melakukan kegiatan ini. Sebelum penanaman padi dilakukan, warga terlebih dahulu melakukan doa bersama agar dijauhkan dari segala macam bentuk gangguan dalam usaha pertaniannya. Bentuk gotong royong ini ditujukan agar petani dalam mengusahakan tanaman padinya tidak terlalu lama dalam melakukan proses penanaman. Apabila selesai satu lahan telah ditanami, maka bergantian ke lahan petani yang lain begitu seterusnya.



Bab VII

Pemerintahan dan Kepemimpinan

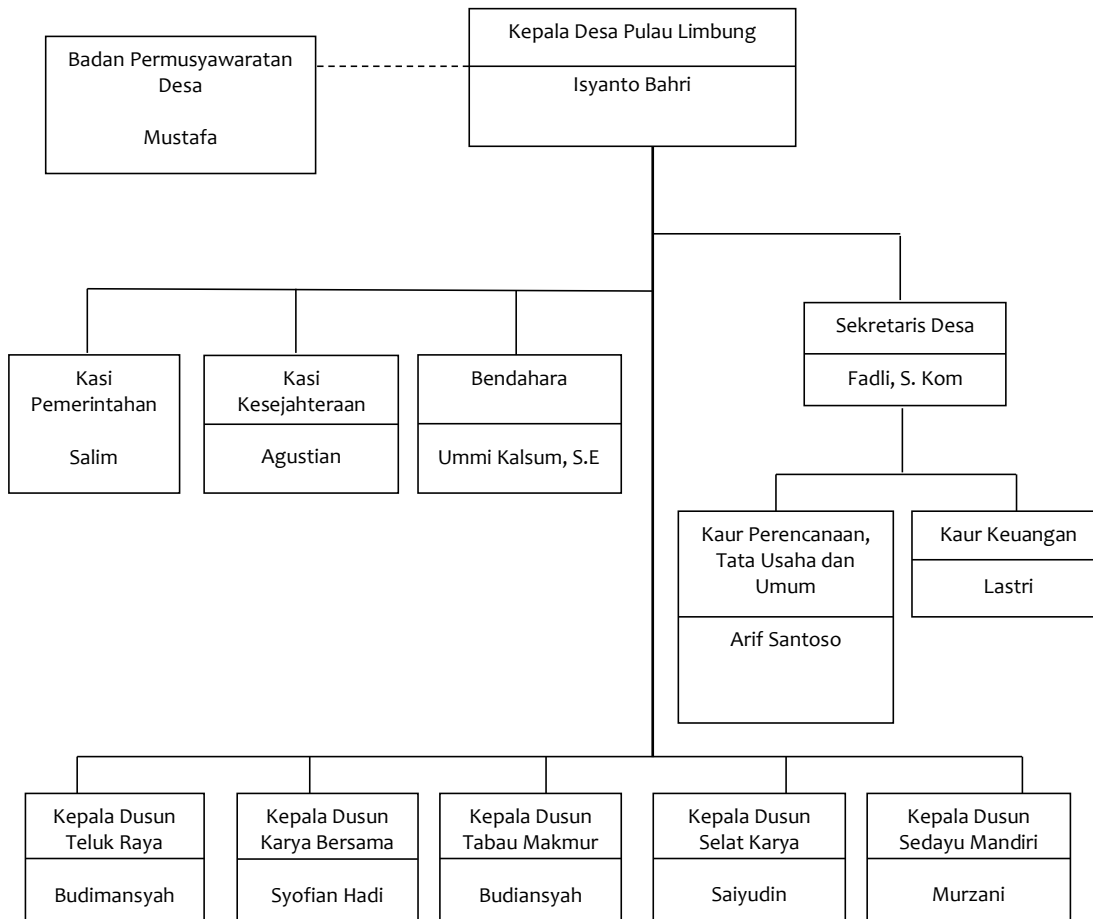
7.1 Pembentukan Pemerintahan

Sebelum terbentuk pemerintahan yang sah wilayah Pulau Limbung hanya tersusun dari kampung-kampung. Secara definitif keberadaan Pulau Limbung menjadi Desa yang diakui pemerintahannya di tahun 1994. sebelumnya, secara struktur pemerintahan desa memang belum ada. Pulau Limbung hanya dipimpin adanya kepala kampung (Penggawe). Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh setempat, kepemimpinan di Pulau Limbung berawal dari adanya Penggawe yaitu Pak Marawi. Kemudian Kepala Kampung yakni Pak Soot.

Barulah di tahun 1994 pemerintahan di Pulau Limbung dibentuk desa yang dipimpin oleh Pak Slamet (Tahun 1994 - 1999). Kemudian dilanjutkan dengan Pak Askah (Tahun 1999 – 2007), Pak Usmandi (Tahun 2007 – 2013). Pak Agus (PJ) (Tahun 2013 – 2015), Pak Isyanto (Tahun 2016 – 2021). Saat ini kepemimpinan Desa Pulau Limbung dipimpin oleh Isyanto Bahri. Di bawah kepemimpinan beliau Desa Pulau Limbung terus berbenah dalam proses pembangunan.

7.2 Struktur Pemerintahan Desa 2018

Secara struktural Perangkat Pemerintahan Desa Pulau Limbung merupakan kengurusan pemerintah dengan kepemimpinan kepala desa baru di lantik oleh bupati kubu raya pada tahun 2016 digambarkan dalam diagram berikut :

Gambar 4. Struktur Pemerintahan Desa Pulau Limbung

Sumber : Profil Desa Pulau Limbung

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok dan fungsi Aparatur Desa Sebangau Jaya adalah:

1. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemerintaha Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa (UU no.6 tahun 2014 pasal 1 ayat 3) dan juga bertugas melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional,, efektif, efisien, bersih serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, menyelenggaran administrasi pemerintahan Desa yang baik, mengelola keuangan Desa dan aset Desa, menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa, mengembangkan potensi sumber daya alam, dan melestarikan lingkungan hidup serta memberikan informasi kepada masyarakat

2. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi adapun fungsi BPD yang berkaitan dengan kepala Desa yaitu (UU RI no.6 tahun 2014 pasal 55) adalah membahas dan menyepakati rencana peraturan Desa bersama kepala Desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala Desa.

3. Sekretaris Desa

Adalah merupakan perangkat Desa yang membantu kepala Desa untuk mempersiapkan administrasi dan melaksanakan pengelolaannya, mempersiapkan bahan penyusunan peraturan Desa, melakukan koordinasi untuk penyelenggaraan rapat rutin; melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala Desa.

4. Pelaksana Teknis Desa

- a. Kepala urusan umum (Kaur umum) bertugas membantu sekretaris dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha, dan juga kearsipan
- b. Kepala urusan perencanaan (Kaur perencanaan) bertugas membantu kepala Desa mempersiapkan bahan rumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat Desa, melaksanakan administrasi pembangunan serta menyiapkan bahan usulan kegiatan
- c. Kepala urusan pemerintahan (Kaur pemerintahan) bertugas membantu kepala Desa dalam melakukan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, membantu penyusunan perencanaan peraturan Desa.

7.3 Kepemimpinan Tradisional

Kepemimpinan lokal (adat) di Desa Pulau Limbung sudah ada sejak tahun 1999. Kepemimpinan lokal ini merupakan organisasi non formal yang kegiatannya adalah menjaga nilai-nilai adat istiadat di Desa Pulau Limbung. Organisasi ini diketuai oleh Burhanudin dan beberapa anggota. Tidak mendapat informasi tentang struktur kepengurusan organisasi ini. Namun pada tahun 2013 kepengurusan adat tersebut sudah tidak berlaku lagi.

Dibekukannya kepengurusan adat ini akibat adanya dorongan dari masyarakat. Karena banyak sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran adat yang tidak ditindak oleh pengurus adat. Setelah itu, terjadi kekosongan dalam masyarakat akan penegakan aturan-aturan adat istiadat di Desa Pulau Limbung.

Maka selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2017 dibentuk kepemimpinan lokal yang bernama “Forum Peduli Kampung”, forum ini dibentuk sebagai pengganti pengurus adat yang pernah dibentuk. Berikut adalah susunan kepengurusan Forum Peduli Kampung:

Ketua : Amran K.
 Wakil Ketua : Miswanto
 Sekretaris : Johana
 Bendahara : Basri
 Anggota : Jumyanto, Iwan, Sahran, Surdi, Ligan, Daiman, Sarjan, Mohtar

7.4 Aktor Berpengaruh

Warga masyarakat Desa Pulau Limbung mempunyai tokoh-tokoh yang cukup disegani. Tokoh-tokoh yang disegani umumnya adalah orang-orang tua yang merupakan warga asli Desa Pulau Limbung yang lahir, tumbuh kembang di desa Pulau Limbung. Adapun aktor-aktor yang berpengaruh di Desa Pulau Limbung diantaranya Muhamad (Tetua Kampung), Amran (Ketua Forum Peduli Kampung), Hamsan (Pejabat Pencatat Nikah), Harsono (Tokoh Masyarakat) dan Pak Aspari (Tokoh Agama). Dari unsur pemerintahan tentu tak luput juga peranan Isyanto (Kepala Desa Pulau Limbung) dan Mustafa (Ketua BPD) yang juga menjadi magnet pengaruh tersendiri oleh masyarakat.

7.5 Mekanisme Penyelesaian Sengketa/Konflik Penguasaan Lahan

Penyelesaian sengketa dalam masyarakat dilakukan dengan musyawarah dan mufakat yang dipimpin oleh Kepala Desa, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat lainnya. Proses musyawarah ini diawali adanya laporan dari masyarakat terkait permasalahan-permasalahan yang ada terkait sengketa lahan antara warga dengan perusahaan atau antara warga dengan warga. Umumnya permasalahan sengketa terkait dengan warga dengan pihak perusahaan PT.SJM. Persoalan adanya areal konsesi perkebunan milik PT.SJM menyulut polemik tersendiri dalam perolehan lahannya. Apabila terjadi konflik, selalu ada upaya mediasi oleh perangkat pemerintahan Desa dengan menghadirkan pihak-pihak terkait. Pihak-pihak yang mengikuti proses musyawarah adalah warga yang bersengketa, pihak yang dituntut baik pihak perusahaan ataupun warga, kepala Dusun, warga yang memiliki lahan di sekitar wilayah yang bersengketa dan pihak-pihak lain yang dianggap perlu untuk dihadirkan dengan hasil di berita acaranya sebagai dokumen desa atas pertemuan penyelesaian konflik penguasaan lahan.

7.6 Mekanisme/Forum Pengambilan Keputusan Desa

Keputusan yang diambil dalam Desa Pulau Limbung umumnya berisikan tentang persoalan-persoalan penting di Masyarakat. Permasalahan yang diperlukan mekanisme forum adalah yang terkait dengan adanya agenda-agenda pembangunan Desa, kepemilikan tanah diluar konsesi perusahaan dan kebijakan pemerintahan Desa didalam menggunakan anggaran.

Mekanisme yang diadakan Desa melibatkan staf-staf pemerintahan Desa, Kepala Dusun, Pengurus Lembaga Formal seperti Koperasi dan BUMDes dan tokoh-tokoh masyarakat. Pertemuan umumnya dilakukan di Balai Desa Pulau Limbung atau bisa saja di rumah Kepala Desa ataupun tokoh-tokoh lain. Tidak heran dinamika di dalam forum biasanya terjadi perdebatan-perdebatan dalam pengambilan keputusan. Bahkan, tak cukup hanya dengan sekali pertemuan saja. Namun, dalam proses akhirnya tetap dihasilkan keputusan-keputusan yang ditimbang dengan seadil-adilnya untuk kemaslahatan masyarakat Desa.



Bab VIII

Kelembagaan Sosial

8.1 Organisasi Sosial Formal

Tabel 13. Hubungan Kelembagaan dan Aktor yang ada di Desa

Lembaga	Peran / Manfaat	Kedekatan
PKK	Sebuah wadah kelompok kerja perempuan dalam pembinaan kesejahteraan perempuan.	Sangat Dekat
LPM	Sebuah wadah yang membantu masyarakat dalam segala kegiatan masyarakat	Dekat
BUMDES	Sebuah wadah yang membantu Desa dalam kesejahteraan masyarakat	Sangat Dekat
Koperasi	Sebuah wadah yang mengelola / membantu anggota petani plasma masyarakat	Dekat
PemDes	Lembaga pemerintah yang membantu masyarakat Desa dalam pelayanan / pembangunan dan pembinaan	Sangat Dekat
BPD	Lembaga pemerintah dan perwakilan masyarakat Desa dalam menerima aspirasi masyarakat dan selaku pengawas kerja pemerintah Desa	Sangat Dekat
MPA	Membantu masyarakat dalam kepulihian lingkungan	Dekat
Karang Taruna	Meningkatkan kesadaran pemuda / pemudi dalam pergaulan	Sangat Jauh
Gapoktan	Suatu lembaga yang gunanya meningkatkan ekonomi masyarakat	Jauh
GSC	Membantu meningkatkan pendidikan dan kesehatan masyarakat	Sangat Dekat

Di dalam Tabel di atas dapat dilihat organisasi apa saja yang ada di desa pulau limbung antara lain PKK, LPM, BUMDES, KOPERASI, PEMDES, BPD, MPA, KARANG TARUNA, GAPOKTAN dan GSC.

Ada beberapa organisasi formal yang beraktivitas di Desa Pulau Limbung diantaranya Tim penggerak PKK Desa Pulau Limbung, Kelompok Posyandu, BUMDes, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Koperasi Mitra Jaya Limbung. Masing-masing organisasi tersebut memiliki fungsi dan tugas masing-masing sesuai dengan program kerjanya.

Tim Penggerak PKK yang diketuai oleh Buniana yang merupakan istri dari Kepala Desa Pulau Limbung, Rosita (Wakil Ketua), Nelly (Sekretaris), Mariana (Bendahara). Tim penggerak PKK ini menjabat selama mulai 2016-2021 mendatang.

Organisasi lain yang ada di Desa Pulau Limbung yakni Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes Pula Limbung merupakan salah satu unit usaha bentukan pemerintah desa dalam upaya meningkatkan pemasukan desa. Adanya BUMDes merupakan amanat Undang-undang Desa (UU No 6 Tahun 2014). Tujuan didirikannya BUMDes agar dapat meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan asset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa. Kepengurusan BUMDes baru terbentuk diawal tahun 2017 dimana terdiri dari Bapak Aspari (Direktur), Sahyudin (Sekretaris) dan Erwin Munandar (Bendahara).

Koperasi Mitra Limbung Jaya merupakan badan usaha yang memiliki peranan cukup strategis di Desa Pulau Limbung. Keperasi ini bermitra dengan PT.SJM sebagai wadah masyarakat Desa yang memiliki hak atas kepemilikan areal plasma kelapa sawit. Anggota koperasi ini sebanyak 686 Kepala Keluarga yang merupakan penerima plasma PT.SJM. Adapun pengurus inti Koperasi Mitra Limbung Jaya yakni Idris sebagai ketua, Riki sebagai Sekretaris, Junarsih sebagai Bendahara, Megawati dan kartono sebagai anggota.

Adapun LPM Desa Pulau Limbung dibentuk untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil. Dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat Desa agar menjadi tenaga penggerak pembangunan yang ada di Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa No. 2 Tahun 2016. Personil kepengurusan LPM Desa Pulau Limbung yaitu Dendi (ketua), Maskun (Sekretaris) dan Yadi (Bendahara). Adapun kelompok posyandu adalah kader muda Desa yang dibentuk dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Perlu dilakukan proses dukungan serta pembinaan untuk merangsang peningkatan kinerja posyandu tingkat desa. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa No. 06 Tahun 2016 pengurus kelompok posyandu Desa Pulau Limbung diantaranya Ketua: Nursiah, Wakil Ketua : Sarlina, Sekretaris : Mega wati, Bendahara : Desi marlina dan Anggota : Yuli.

Ada juga Gapoktan Jaya Bersama yang merupakan gabungan dari kelompok tani yang ada di desa pulau limbung yang berinisiatif menjadikan wadah berorganisasi dalam memajukan pertanian di desa pulau limbung. Gapoktan Jaya Bersama ini di ketuai oleh sahyudin yang merupakan putra asli desa pulau limbung bendahara budiman, seketaris Erwin Munandar beserta 17 anggota lainnya.

Dengan hubungan antara sesama lembaga formal saling mendukung dalam pembangunan dan pemberdayaan di desa pulau limbung

8.2 Organisasi Sosial Nonformal

Ada pun beberapa organisasi non formal yang beraktivitas di Desa Pulau Limbung diantaranya Laki merupakan wadah organisasi dalam pengawasan dan pembinaan terhadap tindak pidana korupsi dan penyelewengan dana anggaran yang ada di desa yang di ketuai oleh bapak harsono seorang tokoh masyarakat di desa pulau limbung yang selalu konsen dan fokus dengan kegiatan anti korupsi, laki ini beranggotakan masyarakat yang mempunyai rasa peduli dengan anggaran perencanaan dan pembangunan di desa. Ada juga kelompok majelis taklim desa juga yang aktif beraktifitas di desa dengan jumlah anggota 30 orang rutin melakukan pengajian-pengajian islam yang bertempat di Masjid Ainul Yaqin yang di ketuai oleh ibu.

8.3 Jejaring Sosial Desa

Dalam Pkk sendiri melalui hasil FGD I kajian hubungan kelembagaan merupakan sebuah wadah kelompok kerja perempuan dalam pembinaan peningkatan kesejahteraan untuk keluarga dengan kedekatan dengan masyarakat sangat dekat. Dalam LPM sendiri merupakan wadah yang membantu dan meningkatkan pemberdayaan atas kesadaran dalam penguatan kapasitas masyarakat di desa dengan kedekatan dengan masyarakat dekat artinya saling membutuhkan.

Bumdes merupakan badan usaha milik desa yang di bentuk pada awal tahun 2017 yang mempunyai peran sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa pulau limbung dengan kedekatan hubungan dengan masyarakat sangat dekat. Koperasi merupakan wadah dalam peningkatan ekonomi juga namun lebih untuk kesejahteraan anggotanya, dalam hal ini lebih kepada petani plasma masyarakat.

Hubungan kedekatan dengan masyarakat dekat. Pemdes merupakan lembaga pemerintah yang sah di tingkat desa yang mempunyai peran membantu masyarakat dalam pelayanan administrasi negara dan infrastruktur yang ada di desa serta pembinaan dan pemberdayaan, hubungan kedekatan dengan masyarakat sangat dekat.

BPD merupakan lembaga khusus perwakilan masyarakat yang mempunyai peran sebagai penerima laporan atau aspirasi masyarakat dan badan pengawas atas kinerja pemerintah desa dengan kedekatan hubungan dengan masyarakat sangat dekat. Laki merupakan wadah peran organisasi dalam pengawasan dan pembinaan terhadap tindak pidana korupsi dan penyelewengan dana anggaran yang ada di desa dengan hubungan kedekatan dengan masyarakat sangat jauh, di karenakan lembaga ini baru berdiri dan pengurusnya baru di lantik tahun 2018.

MPA merupakan organisasi masyarakat yang berasa peduli api mengingat kebakaran hutan dan lahan di lokasi desa pulau limbung. Dengan bermarkas di jungkat tiong sebuah lokasi kantor perusahaan PT SJM. Sebagai wujud rasa kesadaran dan kepedulian bersama antara perusahaan PT.SJM dengan masyarakat maka peran dukungan perusahaan PT.SJM ini dengan MPA sangat kuat sekali. Dengan kedekatan hubungan masyarakat dekat dalam hal kebakaran hutan dan lahan. Karang taruna merupakan organisasi yang di harapkan sebagai wadah keterlibatan pemuda pemudi dalam peningkatan kesadaran dalam pembangunan desa dalam bentuk apa pun namun kurang berjalan aktif sehingga hubungan kedekatan dengan masyarakat sangat jauh.



Bab IX

Perekonomian Desa

9.1 Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDesa berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa. Fungsi dari APBDesa adalah sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, dan alat motivasi.

Postur Anggaran dan Belanja Desa Pulau Limbung tahun 2017 terdiri dari beberapa garis besar yang dirancang dalam upaya meningkatkan pembangunan di Desa tersebut. Berikut ini ringkasan dari postur APBDesa Pulau Limbung.

Tabel 14. Ringkasan APBDesa Pulau Limbung

Uraian	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Persentase (%)
Pendapatan			
Dana Desa	794.940.000		54,39
Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota	50.000.000		3,42
Alokasi Dana Desa	616.670.000		42,19
Belanja			
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		568.149.300	38,73
Pembangunan Desa		734.935.600	50,10
Pembinaan Kemasyarakatan		46.779.600	3,19
Pemberdayaan Masyarakat		37.005.500	2,52
Pembiayaan Modal BUMDes		80.000.000	5,45
Jumlah	1.461.610.000	1.466.870.000	

Sumber : APBDesa Pulau Limbung 2017

Tabel di atas menunjukkan ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa tahun 2017. Pendapatan Desa masih bersumber dari keuangan negara baik Dana Desa (APBN) maupun Alokasi Dana Desa dan retribusi daerah (APBD). Porsi belanja tahun 2017 pemerintah Desa Pulau Limbung mengalokasikan 50,1% untuk pembangunan desa.

Artinya terdapat beberapa pembangunan dan pemeliharaan baik itu jalan, jembatan, sarana air bersih serta fasilitas kesehatan. Di bidang pemerintahan Desa porsi anggaran sebesar 38,73% digunakan untuk operasional pengurus desa dan BPD, insentif pengurus RT/RW, pelaksanaan musyawarah Desa dan lain-lain.

Pembinaan masyarakat sebesar 3,19% dari total belanja Desa Pulau Limbung digunakan untuk menunjang aktivitas organisasi formal di Desa seperti penggerak PKK, LPM dan penyelenggaraan keamanan ketertiban masyarakat. Pemberdayaan masyarakat meliputi kegiatan-kegiatan dalam Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan; pengadaan pelatihan-pelatihan bagi pengurus Desa dan BPD; pelatihan BUMDes dan kelompok usaha masyarakat lainnya.

9.2 Aset Desa

Berdasarkan informasi dari sekretaris Desa Pulau Limbung aset desa yang bergerak diantaranya Laptop 5 unit, kipas angin 3 unit, CPU 10 unit (9 unit rusak, 1 unit baik), televisi dan parabola 1 unit, mesin damkar 3 unit, speaker 1 unit, speedboat 3 unit, aki 2 unit, printer 4 unit, infocus 1 unit, kamera 1 unit, mesin sedot pasir 1 unit, mobil ambulance 1 unit, keramba ikan 1 unit, chain saw 1 unit, tab samsung 1 unit dan alat-alat grup musik mitra 2016 1 set. Sedangkan aset Desa yang tidak bergerak yaitu Kantor Desa 1 unit, Balai Pertemuan 1 Unit, tanah yang dipertukan pembangunan kantor desa baru seluas 0,4 ha, areal plasma kelapa sawit atas nama Desa Pulau Limbung sebanyak 3 kavling (6 ha).

9.3 Tingkat Pendapatan Warga

Semenjak masuknya perusahaan sawit banyak masyarakat yang bekerja sebagai buruh. Upah buruh perusahaan sawit sejumlah Rp 76.000 / hari, jika dalam 1 bulan bekerja selama 25 hari maka upah yang didapatkan selama 1 bulan sejumlah Rp 1.900.000. Jika bekerja sebagai buruh perkebunan masyarakat tidak bisa mengerjakan pekerjaan lainnya karena faktor waktu dan tenaga. Namun tidak semua masyarakat Desa Pulau Limbung bekerja sebagai buruh, ada juga yang menjadi petani, nelayan, pekerja kayu dan pekerja ditambang pasir.

Warga yang berprofesi sebagai petani umumnya mengusahakan tanaman padi, sayur-sayuran (timun, kacang) dan buah-buahan (semangka). Pendapatan mereka bervariasi dan tidak menentu. Seperti usaha semangka, buah ini hampir setiap tahunnya dibudidayakan di Desa Pulau Limbung. Namun pada tahun ini karena curah hujan tinggi, lahan mereka terendam air. Akibatnya gagal produksi dialami petani semangka Desa Pulau Limbung.

Seperti yang telah diulas bab sebelumnya, Desa Pulau Limbung merupakan pemukiman pinggiran sungai Kapuas. Maka ada juga warga yang berprofesi sebagai nelayan air tawar. Aktivitas nelayan di Desa Pulau Limbung dilakukan di sekitar wilayah desa saja. Hasil tangkapan mereka berbagai macam jenis ikan air tawar. Alat tangkapnya masih tradisional bisa berupa jala, pukat ataupun pancing tergantung jenis apa yang akan ditangkap. Jenis-jenis tangkapan umumnya ikan patin, baung, toman, tapah, belidak dan udang galah. Berdasarkan informasi yang diperoleh hasil yang didapat nelayan Desa Pulau Limbung juga tidak menentu.

Penghasilan yang cukup besar adalah warga yang berprofesi di pengolahan kayu dan penyedotan pasir sungai. Penghasilan mereka dalam sehari paling sedikit Rp 100.000,-. Namun, tidak semua warga mampu untuk melakukan pekerjaan ini. Dikarenakan pekerjaannya cukup berat dan menggunakan tenaga ekstra.

Tabel 15. Mata Pencanharian

Jenis mata pencaharian	Jumlah tenaga kerja laki-laki	Jumlah Tenaga kerja Perempuan	Bahan baku	Pemasaran	Masalah
Sektor Pertanian					
Pertanian	112	107	Pupuk, bibit, anti hama	Warga desa	Hama, pemasaran
Nelayan	80	18	Bibit ikan, pukat, jala, pancing	Warga desa, penampung ikan	Harga rendah
Perkebunan Karet	5	8	Pupuk, anti hama	Peraeh motor bandong	Harga getah turun
Perkebunan Sawit	273	456	Pupuk, anti hama	Tengkulak	Harga ditekan oleh tengkulak
Sektor non pertanian					
Jasa kesehatan		2	Obat-obatan, alat pemeriksa	Warga desa	Sarana dan prasarana minim, honor kecil
Jasa pendidikan	8	14	Sarana penunjang sistem pembelajaran	Warga desa	Sarana dan prasarana minim, honor kecil
Pembuatan kerajinan	5	12	Bahan kerajinan	pesanan	Pemasaran sulit, harga rendah

9.4 Industri dan Pengolahan di Desa

Di Desa Pulau Limbung terdapat kerajinan tangan tikar bemban dan rotan. Kerajinan ini hanya dikerjakan oleh orang pribadi. Produk kerajinan tikar ini tidak dijual secara masif. Penjualan dilakukan hanya kepada konsumen yang berminat artinya hanya berdasarkan pesanan. Selain kerajinan, industri lokal yang ada di Desa Pulau Limbung yaitu pengolahan kayu. Terdapat 6 unit sawmill (penggergajian kayu) di Desa Pulau Limbung. Kayu yang diolah berasal dari hutan yang berada di sekitar Pulau Limbung. Hasil penggergajian kayu ini dijual ke Pontianak dengan angkutan sungai dalam bentuk papan atau kayu persegi untuk bahan bangunan. Ada juga produksi rumah kerupuk ikan gabus dan masih memproduksi masih di skala desa saja belum sampai di pasarkan keluar desa.

9.5 Potensi dan Masalah dalam Pengelolaan Lahan Gambut

Desa Pulau Limbung mempunyai luas wilayah ($\pm 11.233,62$ Ha) dengan Dataran gambut lebih mendominasi, sekiranya 80% wilayah Desa Pulau Limbung adalah gambut. Dengan adanya lahan gambut di desa menjadikan unsur potensi dan unsur masalah yang ada di desa.

Desa Pulau Limbung memiliki potensi alam yang apabila dikelola dengan baik bisa menambah pemasukan Desa. Ada 2 potensi utama yang dapat dikembangkan disana yaitu pertanian, perikanan dan pertambangan. Ketiga sector tersebut apabila dikelola dengan baik akan menghasilkan potensi yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Pulau Limbung.

Di sektor pertanian misalnya, usaha yang masih belum dimaksimalkan potensi yaitu tanaman hortikultura. Masyarakat Desa Pulau Limbung saat ini aktif menanam buah semangka setiap tahunnya. Budi daya semangka di Desa Pulau Limbung cukup baik pertumbuhannya. Dalam setiap panen, hasil semangka bisa lebih dari 1 ton. Namun, terdapat permasalahan yang berdampak pada menurunnya produktivitas. Banjir, serangan hama, ketersediaan pupuk dan informasi tentang pengelolaan budidaya yang baik dan benar merupakan masalah utama sektor pertanian.

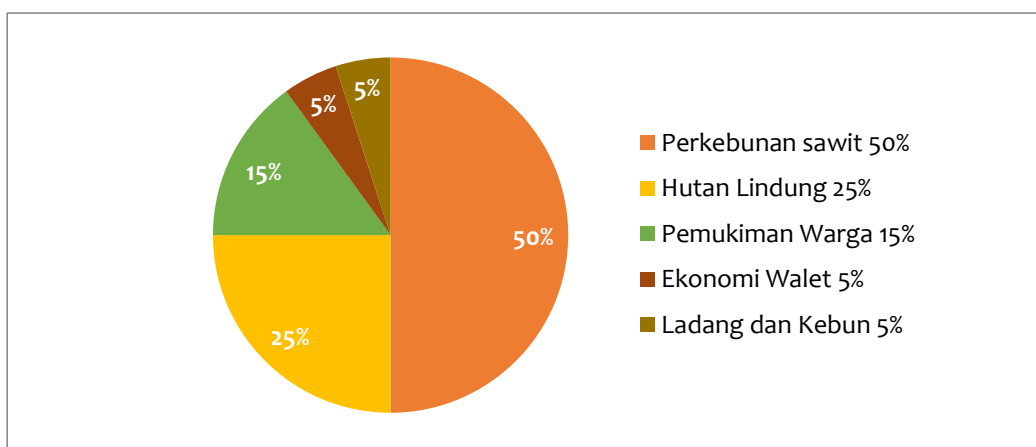
Karena Desa Pulau Limbung merupakan wilayah pesisir sungai Kapuas, dapat juga dikembangkan sektor perikanan baik usaha tangkap maupun budidaya. Saat ini, masyarakat hanya aktif sebagai nelayan tangkap. Hasil tangkapan ini, hanya dipasarkan di Desa Pulau Limbung dan Desa-desanya sekitarnya. Saat ini, keberadaan ikan sangat bergantung musim apalagi sejak adanya PT.SJM terjadi penurunan tangkapan. Potensi yang masih belum dikembangkan adalah usaha budidaya perikanan. Menurut informasi perangkat Desa Pulau Limbung, pernah ada warga yang mengusahakan budidaya ikan keramba. Namun, terjadi kegagalan karena banyak ikan yang mati. Sehingga saat ini warga sudah tidak mau lagi mengusahakan budidaya keramba ini. Peran penyuluhan sangat diperlukan dalam mengembangkan sektor ini.

Sektor pertambangan juga pernah menjadi sumber pendapatan desa yang cukup besar di Desa Pulau Limbung. Yaitu berupa pengambilan pasir sungai sebagai bahan material bangunan ataupun konstruksi. Pasir sungai di Desa Pulau Limbung ini sudah dieksploitasi sejak puluhan tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak habis-habis. Ribuan m³ diangkut oleh ponton setiap harinya. Pasir ini dibawa ke Pontianak untuk diperjual belikan kembali. Bahkan kabarnya juga sempat dibawa ke DKI Jakarta sebagai material dalam proyek reklamasi yang sempat berpolemik. Permasalahan adanya pengambilan pasir sungai ini tidak berdampak terhadap pendapatan asli Desa. Sejak pemerintah pusat membentuk Saber Pungli awal tahun 2017 yang lalu, Pemerintah Desa Pulau Limbung tidak bisa lagi mendapatkan fee dari pengusaha-pengusaha pasir ini. Padahal sebelumnya pendapatan asli Desa Pulau Limbung bisa mendapat lebih dari Rp 1 Milyar per tahunnya dari bagi hasil pasir ini.

Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah dan Sumber Daya Alam

Desa Pulau memiliki wilayah yang cukup luas, namun masih belum dimaksimalkan potensi lahannya. Pemukiman yang berada di pinggir sungai kapuas menjadikan penguasaan tanah hanya di daratan yang menyebar di sepanjang sungai pula. Apalagi lahan gambut, yang letaknya berada masuk ke dalam membuat warga enggan mengusahakannya. Namun, sejak adanya konsesi perkebunan PT.SJM masuk hampir seluruh areal gambut di Desa Pulau Limbung dikuasai oleh perusahaan kecuali hutan lindung dan lahan bersertifikat. Tidak ada pengaturan pola pemanfaatan tanah, jika masyarakat ingin mengolah tanah diperbolehkan sesuai dengan kemampuan dan tidak sedang berada di wilayah berizin dan status kawasan hutan.

[illegible]

Gambar 6. Grafik Pola Pemanfaatan dan Penguasaan Ruang**Tabel 16. Pemanfaatan Tanah dan sumberdaya**

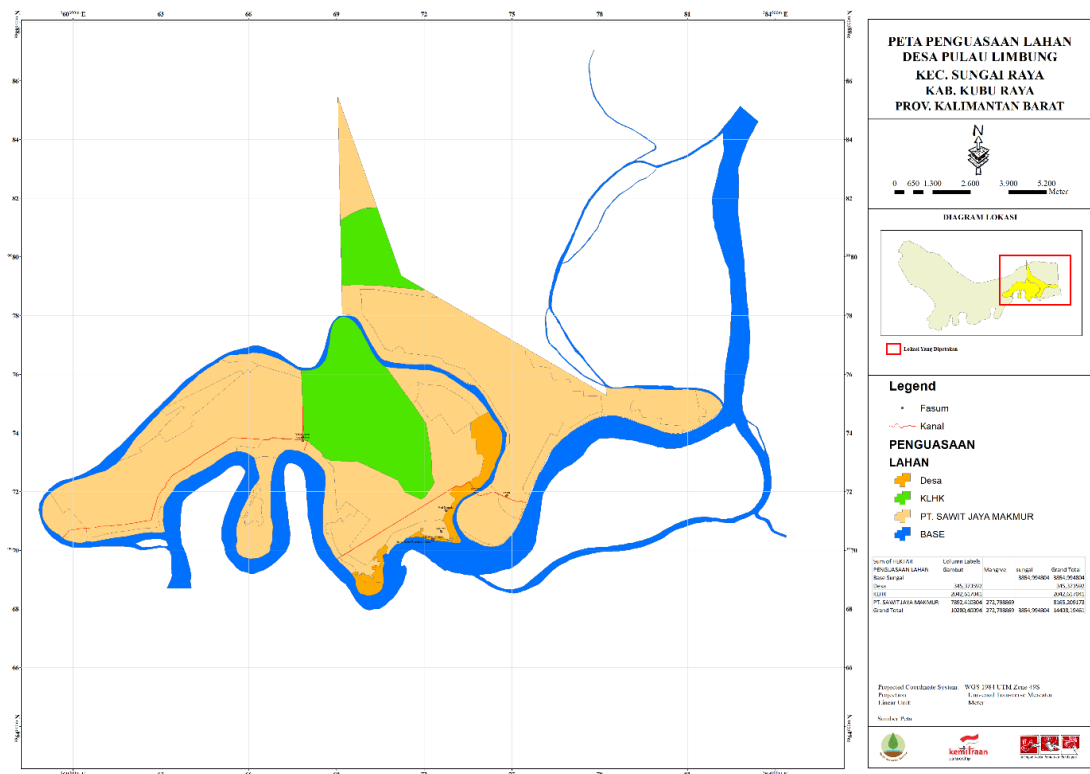
Jenis Pemanfaatan	Jenis Tanah	Yang Dimanfaatkan	Potensi yang belum	Permasalahan yang Dihadapi	Pemanfaatan	Status Kepemilikan
Perkebunan kelapa sawit	gambut	Untuk penanaman kelapa sawit/buah	Tangkos sawit yang bisa	Konflik lahan	Dijual untuk mendapatkan	Perusahaan
Hutan lindung	Gambut	• Kayu	ekowisata	Penebangan secara liar	Untuk kebutuhan sehari-hari dan hasil alamnya dijual untuk penghasilan	Negara
		• Rotan				
Pemukiman warga	mineral	Tempat tinggal dan usaha		Banjir	Tempat tinggal dan mendapatkan penghasilan	individu
Sawah dan perkebunan	mineral	Padi, sayuran dan buah-buahan	Belum adanya penanganan saat banjir dan cara berkebun belum menggunakan galangan	Banjir dan sistem tanam	Kebutuhan sehari-hari dan dijual guna menambah penghasilan	Individu
Perekonomian walet	mineral	Sarang dan kotorannya		Pencemaran lingkungan	Dijual untuk mendapatkan penghasilan	individu

Berdasarkan hasil FGD (Forum Grup Discusion), pengamatan dan wawancara dengan masyarakat. Di peroleh data persentase Pemanfaat dan penggunaan ruang desa beserta potensi masalahnya perkebunan sawit menunjukan 50% penguasaan kemudian hutan lindung 25% selanjutnya pemukiman warga 15% ekonomi walet mempunyai peratan mata pencaharian baru di sektor ekonomi sebesar 5% dan ladang dan kebun masyarakat sebesar 5%

10.2 Penguasaan Tanah dan Sumber Daya Alam

Luas Desa Pulau Limbung ± 11.233,62 Ha. Luas konsesi perusahaan sawit 4.754,86 Ha, tutupan hutan 3.918,73 Ha yang terdiri hutan lindung seluas 1.129,36 Ha dan wilayah kelola masyarakat yang belum dikelola seluas 2.789,37 Ha dan wilayah kelola masyarakat yang sedang dikelola seluas 1.823,58 Ha. Penguasaan air sungai dikelola masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi, cuci, kakus, dan mencari ikan. Berikut bentuk penguasaan lahan di Desa Pulau Limbung.

Gambar 7. Penguasaan Tanah dan sumberdaya



Tabel 17. Bentuk Penggunaan Lahan di Desa Pulau Limbung.

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Hutan Lindung	1.129,36	10,05
2.	Hutan Produksi Konversi	2.789,37	24,83
3.	Konsesi Perkebunan PT.SJM	4.754,86	42,32
4.	Konsesi Perkebunan PT.KAS	689,38	6,21
5.	Lahan masyarakat.	1.823,58	16,23

Sumber : Peta penggunaan lahan Desa Pulau Limbung 2016.

10.3 Penguasaan Lahan Gambut atau Parit/Handil

Desa Pulau limbung memiliki wilayah yang cukup luas, namun masih belum dimaksimalkan potensi lahannya. Pemukiman yang berada di pinggir sungai kapuas menjadikan penguasaan tanah hanya di daratan yang menyebar di sepanjang tepian sungai pula. Apalagi lahan gambut, yang letaknya berada masuk ke dalam membuat warga enggan mengusahakannya. Namun, sejak adanya konsesi perkebunan PT.SJM masuk hampir seluruh areal gambut di Desa Pulau Limbung dikuasai oleh perusahaan kecuali hutan lindung dan lahan besertifikat. Tidak ada pengaturan pola pemanfaatan tanah, jika masyarakat ingin mengolah tanah diperbolehkan sesuai dengan kemampuan dan tidak sedang berada diwilayah berizin dan status kawasan hutan.

10.4 Peralihan Hak Atas Tanah (termasuk Lahan Gambut)

Hak atas tanah adalah hak yang memberi kewenangan kepada seseorang yang mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah tersebut. peralihan hak atas tanah yakni dengan mewariskan hak atas tanah kepada ahli waris atau memindahkan hak atas tanah kepada orang lain dengan menukar atau jual beli tanah. Peralihan Hak Atas Tanah tidak dapat dilepaskan dari aspek kehidupan masyarakat itu sendiri karena peralihan hak atas tanah merupakan proses dari perekonomian dan kesejahteraan masyarakat melalui bidang pertanian.

Sehingga pembuatan kebijakan sebelum diaplikasikan pada wilayah khususnya pedesaan harus ada peninjauan langsung ke lokasi hak atas tanah. Di Desa Pulau Limbung wilayah kelola masyarakat berada di pinggir Sungai Kapuas, karena memudahkan jalur transportasi sungai. Sedangkan perusahaan sawit lebih ke darat atau tengah desa pulau limbung di karenakan akses transportasi lebih mudah.

10.5 Sengketa Tanah di Lahan Gambut dan Non-Gambut

Sengketa Tanah di lahan gambut dan non gambut di desa pulau limbung sudah terjadi ketika perusahaan sawit mulai masuk ke desa pulau limbung dan akhirnya PT. SJM pernah menggusur lahan masyarakat tanpa izin terlebih dahulu, namun konflik tersebut dapat diselesaikan dengan cara mediasi antara masyarakat dan pihak perusahaan.

Namun demikian, walaupun sudah dilakukan mediasi menurut masyarakat kasus tersebut tidak ada kejelasan sampai saat ini. Muaranya dari kasus itu ada juga permasalahan lahan yang sudah di sertifikatkan pada hal masuk dalam wilayah hutan lindung. Tepatnya pada tahun 2012 masuknya perusahaan sawit membuat nilai harga tanah mulai mengalami perebutan berbagai pihak dengan ke inginan beberapa masyarakat untuk di plasma kan di wilayah bufferzone atau zona penyangga yang seharusnya tidak boleh di sertifikatkan karena masih menjadi satu kesatuan hutan lindung milik negara.

Selain itu, juga terjadi konflik batas desa antara Desa Pulau Limbung dan Desa Pulau Jambu yang merupakan desa pemekaran dari Desa Pulau Limbung. Sampai saat ini konflik tersebut masih belum terselesaikan.



Bab XI

Proyek Pembangunan Desa

11.1 Program Pembangunan Desa

Undang-Undang Desa menggunakan 2 (dua) pendekatan dalam pembangunan desa, yaitu ‘Desa membangun’ dan ‘membangun Desa’ yang diintegrasikan dalam perencanaan Pembangunan Desa. Ini berarti pembangunan desa merupakan konsolidasi dari program/kegiatan di desa, penguatan kelembagaan desa, perencanaan dan keuangan desa sekaligus sebagai penguatan mekanisme representasi dan akuntabilitas di tingkat lokal.

Desa membangun menjadikan desa sebagai subyek utama pembangunan. Desa membangun fokus pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Desa membangun mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial (lihat pasal 78 UU Desa).

Untuk Mewujudkan pelaksanaan pembangunan Desa Pulau Limbung pemerintah desa melihat kebijakan pemerintah kabupaten Kubu Raya sebagai dasar arah pembangunan desa selama kurun waktu 2013-2019. Di dalam visi dan misi pembangunan desa di tuangkan ke dalam kebijakan umum program prioritas yang merupakan program unggulan pemerintah desa.

Kebijakan umum pada hakekatnya merupakan arahan kebijakan pembangunan yang di pilih dengan target indikator kinerja beserta program unggulan menurut urusan. Dengan demikian, kebijakan umum dan program unggulan yang disampaikan dalam rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDES) ini hanya bersifat prioritas, sementara untuk kebijakan umum dan program yang terkait penyelenggaraan dituangkan dalam rencana strategis (Renstra) satuan kinerja perangkat daerah (SKPD)

Penjelasan kebijakan umum dan program unggulan berdasarkan misi pembangunan dapat di jelaskan sebagai berikut:

- a) Melaksanakan Program Unggulan yang merupakan Program Prioritas dalam pembangunan daerah selama 6 tahun dalam rangka penyelesaian permasalahan yang ada.
- b) Melaksanakan program prioritas daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintah yang harus dilaksanakan.
- c) Melaksanakan program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan minimal dan optimal.
- d) Mengakomodir semaksimal mungkin program pembangunan yang dijarah melalui aspirasi masyarakat dalam Musrenbangdes.
- e) Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengetasan kemiskinan.
- f) Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat seperti halnya dukungan pencapaian target pembangunan nasional (*pro poor, projob, progrowth, proenviromtent, MDG's dan MP3EI*), pemenuhan ketentuan perundang-undangan (anggaran pendidikan lebih dari 20% dan anggaran kesehatan 10%), pendamping program Pemerintah Pusat, serta pendamping program Pemerintah Provinsi.
- g) Meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat desa.

Undang-undang Desa telah memberi dasar yang cukup lengkap mengenai siklus Desa membangun yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan dan pemanfaatan hasil pembangunan sebagaimana dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 18. Penggunaan Dana Desa pada program pembangunan dan pemberdayaan

No	Program	Uraian Kegiatan	Jumlah (Rp)
Bidang Pembangunan			
1.	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Transportasi.	Pembanguna Jalan Permukiman Jembatan Desa dan dermaga 4m x 1,2m / 4m x 6m RT. 013/RW.005 Dusun Sedayu Mandiri.	71.873.700
		Pembangunan Jalan Pemukiman Jembatan Desa Komposit 90m x 1,5m RT. 006/ RW. 002 Dusun Karya Bersama.	155.795.700
		Pembangunan Jalan Pemukiman Jembatan Desa Komposit Turunan 14,5 m x 2,1 m RT. 004 / RW. 006 Dusun Karya Bersama.	48.418.500
		Pemeliharaan Jalan Pemukiman Jalan Desa Komposit 180 m x 1,3 m RT. 003 / RW. 003 Dusun Teluk Raya	143.407.000
		Pembangunan Jalan Pemukiman Jalan Desa Rabat Beton (Manual) 100m x 2,0m RT. 012 / RW. 004 Dusun Selat Karya.	40.476.500
		Pemeliharaan Jalan Pemukiman Jalan Desa Komposit 28 m x 1,2 m x 0,8 Cm RT. 009 / RW. 003 Dusun Tabau Makmur	25.920.000
2.	Pengadaan, Pembangunan, Pengembanngan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Pembangunan Air bersih berskala Desa PAH 22 Unit	83.634.000
		Pembangunan WC Umum 2m X 3m	43.622.200
3.	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan	Pengadaan Penunjang PAUD	10.000.000
		Pengadaan Alat Kesenian	27.288.000
4.	Pengadaan Dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Pengadaan penggilingan padi	37.000.000
Sub Total Bidang Pembangunan			734.935.600
Bidang Pemberdayaan			
5.	Kegiatan dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	20.000.000
6.	Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa	Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa	2.125.000
		Pelatihan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	3.930.000
		Pelatihan Pengelolaan Aset Desa	2.125.000
7.	Kegiatan Pendukung Kegiatan Ekonomi Baik Yang Dikembangkan Oleh BUM Desa Maupun Kelompok Usaha Masyarakat Desa Lain	Pelatihan BUM Desa	3.840.000
		Pelatihan dan perawatan mesin pengiling padi	4.985.500
Sub Total Bidang Pemberdayaan			37.005.500
Grand Total			771.941.100

Sumber : APBDesa Pulau Limbung 2017.

Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Kubu Raya merupakan sumber pendanaan Desa Pulau Limbung dalam melaksanakan program pembangunan. Alokasi penggunaan ADD di Desa Pulau Limbung ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 19. Penggunaan ADD Desa Pulau Limbung

No	Program	Uraian Kegiatan	Jumlah (Rp)
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	205.381.400
		Operasional Perkantoran	91.324.900
		Operasional BPD	13.420.000
		Operasional RT/RW	86.400.000
		Penetapan dan Penegasan Batas Desa.	2.950.000
		Pendataan Desa.	10.665.000
		Penyelenggaraan musyawarah Desa.	7.020.000
		Penyelenggaraan Perencanaan Desa	1.964.000
		Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa	149.024.000
2.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Penunjang Kegiatan PKK	12.900.000
		Penunjang kegiatan LPM	19.700.000
		Pengadaan Perlengkapan Pengantin	13.000.000
		Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	1.179.600
		Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa	8.180.000
Grand Total			623.108.900

Pembangunan yang pernah ada di Desa Pulau Limbung adalah pembangunan PLN yang dibangun oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) yaitu Kondisi kelistrikan yang terdapat di Desa Pulau Limbung hanya dapat dinikmati di malam hari saja melalui pembangkit tenaga diesel. Sebelumnya, warga yang tinggal di Dusun Tabau Makmur, Dusun Karya Bersama dan Dusun Teluk Karya dapat menikmati listrik siang dan malam. Disiang hari, sumber yang digunakan berupa tenaga surya. Listrik tenaga surya ini saat ini sudah tidak dioperasikan lagi untuk masyarakat umum. Karena tidak terdistribusi ke semua rumah warga. Ada rumah warga yang menyala, namun rumah warga lain di sekitarnya tidak. Akhirnya, ditahun 2015 diputuskan bersama listrik tenaga surya yang digunakan warga disiang hari ditiadakan. Akan tetapi, penggunaannya dialihkan untuk kepentingan masyarakat seperti di balai desa, puskesmas dan poskesdes saja.

Dibidang pendidikan terdapat juga proyek-proyek lainnya yang bersumber dari APBD maupun APBN seperti (tenaga diesel dibangun tahun 1997, tenaga surya tahun 2000), p(TBM) t, pPembangunan sekolah yang saat ini sedang berlangsung adalah pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang bersumber dari APBN. Keberadaan SMK di Pulau Limbung sangat dinanti-nanti oleh masyarakat. Selama ini siswa yang mengenyam pendidikan SMA sederajat harus ke daerah lain. Sehingga bagi warga yang memiliki keterbatasan untuk mensekolahkan anaknya keluar terpaksa harus putus sekolah dan bekerja sebagai buruh perkebunan.

Sebagai penguatan akses komunikasi juga terdapat pengadaan fasilitas internet tahun 2016 Internet desa ini merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah dalam upaya menyediakan jaringan internet khususnya untuk pemerintah desa untuk mengirim data dan lain-lain. Namun sampai saat ini fasilitas ini masih belum berfungsi karena ada komponen alatnya yang rusak dan akan diadakan kembali di tahun anggaran 2018.

Hingga saat ini belum ada upaya pembangunan dalam aspek restorasi gambut. Namun di tahun ini (2017) Badan Restorasi Gambut membuat 2 sekat kanal yang dibangun areal rawan kebakaran hutan dan lahan di Desa Pulau Limbung. Pengerjaannya bekerja sama dengan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPKM) Universitas Tanjungpura. Saat ini, Selain pekerjaan sekat kanal, terdapat juga perogran pengadaan kambing untuk peternakan sebagai upaya membantu usaha masyarakat Desa Pulau Limbung. Serta mini demplot sebagai media latih dan berdiskusi antara petani di desa.

11.2 Program Kerjasama dengan Pihak Lain

Untuk program kerjasama dengan pihak lain dalam hal ini hanya bersifat peningkatan di bidang ekonomi pribadi masyarakat melalui perjanjian kontrak dengan perusahaan dengan mekanisme bagi hasil atau angkutan bibit kelapa sawit sampai ke lokasi tanam, atau angkutan buah kelapa sawit hasil panen. itu pun apa bila pribadi masyarakat memiliki kendaraan pribadi seperti pickup atau truk.

Selain itu juga kerja sama dengan perusahaan antara masyarakat dengan perusahaan di bidang kebakaran hutan dan lahan dengan terbentuknya Masyarakat Peduli Api dimana perusahaan mendukung setiap kegiatan MPA ini dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di desa pulau limbung.



Bab XII

Persepsi terhadap Restorasi Gambut

Setelah kebakaran hebat tahun 2015 dan itu diperkirakan 2 juta hektar lahan gambut terbakar, lalu Presiden mencanangkan membentuk badan khusus atau agensi yang menangani bagaimana mengembalikan gambut ini, merestorasi gambut ini. Kemudian tahun 2016 awal, Peraturan Presiden baru 6 Januari 2016 membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) yang bertugas khusus melakukan restorasi. Menurut Perpres BRG ditugasi untuk merestorasi kebakaran tahun 2015 yang (luasnya) adalah 2 juta hektar. Tetapi dalam perjalanan, dilakukan riset dan aktivitas untuk memetakan gambut yang terbakar tahun 2015, ternyata ditemukan lahan tidak 2 juta hektar tetapi 2.4 juta hektar. Dari 2.4 juta hektar itu, 1.4 juta hektar itu adalah areal konsesi. Sehingga BRG tidak punya akses ke pemegang konsesi.

Lalu 600 ribu hektar diantara 2.4 juta hektar itu diantaranya adalah /protected area/ (area konservasi) dan hutan lindung. Tinggal yang 400 ribu hektar ini yang kepunyaan masyarakat. Jadi BRG bekerja secara khusus melakukan intervensi di 400 ribu dan 600 ribu luas lahan. Seluas 600 ribu bekerjasama dengan KLHK, sedangkan 400 ribu hektar, BRG dapat bekerja langsung. Lalu 1.4 juta hektar itu kewajiban dari dan BRG melakukan pemantauan. Itu gambaran target yang harus dicapai BRG sampai tahun 2020. Target BRG 2.4 juta hektar itu tersebar di 7 Provinsi. 3 di pulau Sumatra, yakni Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Tiga di Kalimantan, yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Dan satu daerah lagi di Papua.

Desa Pulau Limbung merupakan salah satu desa yang disasar program Desa Peduli Gambut oleh BRG tahun 2017. Masyarakat Desa Pulau Limbung memberikan respon positif dengan menyambut baik semua program ini. Program DPG-BRG meliputi Perencanaan dan pembentukan kawasan perdesaaan gambut, fasilitasi perhutanan sosial, reforma agraria, resolusi konflik, pemberdayaan ekonomi desa dan penguatan kelembagaan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan gambut, termasuk pembahasahan gambut, revegetasi dan revitalisasi. Masyarakat Desa Pulau Limbung optimis dengan keberhasilan restorasi gambut. Untuk mendukung hal tersebut masyarakat berharap pendampingan dari BRG secara berkala di Desa Pulau Limbung.

Pembasahan lahan gambut di Desa Pulau Limbung memang sangat perlu dilakukan untuk mengatasi kebakaran hutan lahan gambut yang sering dialami setiap musim kemarau dan pengaturan aliran air sangat diperlukan agar lahan gambut yang ada di desa Pulau Limbung selalu basah. Meningkatnya debit air dari desa tetangga perlu ditangani secara matang karena mengakibatkan lahan gambut selalu tergenang (banjir) apabila air pasang dan musim penghujan. Bentuk penanganan yang cocok untuk areal gambut di Desa Pulau Limbung pada musim air pasang dan penghujan dengan cara normalisasi sungai dan membangun sekat kanal yang berbatasan langsung dengan desa tetangga. Pengurangan debit air ini dibutuhkan pengaturan yang baik sehingga pada musim kemarau lahan gambut tetap basah dan pada saat musim air pasang dan penghujan, area lahan gambut tidak selalu tergenang (banjir).

Alternatif tanaman yang cocok di tanam di lahan gambut Desa Pulau Limbung merupakan tanaman yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang rata-rata bermata pencaharian sebagai petani seperti kelapa, padi, jagung, ubi kayu (singkong), kacang panjang, talas (keladi), nanas, mangga, labu peringgi, semangka, buah naga, pisang, dan tebu. Selain dari tanaman tersebut, alternatif tanaman lainnya seperti albasia, albasia, jelutung, kopi, kelapa, pinang dan coklat. Untuk menjaga kelestarian lahan gambut di Desa Pulau Limbung tentunya alternatif tanaman yang ditanam merupakan ciri khas tanaman di lahan gambut sendiri agar gambut yang ada didesa Pulau Limbung ini tetap ada dan lestari.

Ukuran keberhasilan Restorasi Gambut pada saat dimulainya program ini, belum bisa di ukur karena kegiatan ini belum dimulai. Untuk saat ini baru masuk ke tahap sosialisasi dan penilaian kawasan gambut yang ada di Desa Pulau Limbung. Kedepannya seiring dengan berjalannya program Restorasi Gambut, dari pihak Desa Pulau Limbung akan merancang perencanaan terhadap kawasan gambut agar kawasan tersebut tidak rusak akibat terjadinya kebakaran lahan. Pencegahan kebakaran lahan gambut merupakan salah satu alternatif yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian area lahan gambut. Untuk itu, peran serta warga Desa Pulau Limbung khususnya warga yang lokasinya berada di area lahan gambut sangat diperlukan untuk menjaga kelangsungan ekosistem gambut yang ada agar tetap lestari dan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat disekitar.

Sementara itu, sekat kanal/sumur bor belum memadai, untuk itu perlu dibuat (ditambah) sesuai dengan tata pengelolaan yang baik dan benar sehingga masyarakat sekitar tidak mengalami banjir dan dapat mencegah terjadinya kebakaran lahan, karena di desa Pulau Limbung masih belum bisa untuk mencari cara dalam tata pengelolaan sekat kanal atau pun sumur bor.



Bab XIII

Penutup

13.1 Kesimpulan

Gambut sangat perlu untuk dijaga, karena disamping untuk melakukan upaya rehabilitasi kembali kawasan-kawasan yang telah rusak, juga diharapkan akan berdampak pada penurunan terhadap ancaman bahaya kebakaran hutan dan lahan. Karena itu kepedulian pemerintah dan masyarakat sangatlah penting untuk menjaga dan melindungi kelestarian alam.

Selain pemerintah melibatkan masyarakat, pemerintah juga sewajarnya menanamkan rasa peduli lingkungan terhadap anak – anak usia dini dari tingkat dasar dan perguruan tinggi dengan program – program peduli lingkungan yang lebih nyata tidak hanya sebatas program penghijauan atau penanaman kembali, tapi bagaimana mereka bisa mengetahui dan melihat hutan sebagai ekosistem yang harus dijaga keberlangsungannya untuk di masa depan.

13.2 Saran

Perlu disusun sebuah *Road map* pencegahan kebakaran hutan. pemetaan terhadap bentuk-bentuk strategi upaya pencegahan kebakaran hutan di ekosistem gambut sebaiknya disusun dengan secara terarah baik dari segi jenis kegiatan, lokasi kegiatan dan sasaran kegiatan

Selain itu perlu diadakan ulang pengumpulan data yang intensif dalam upaya pemenuhan data profil desa yang sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

